

**Peran *International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex Association (ILGA)* Dalam Legalisasi *Same-sex Marriage* di Brazil
Pada Tahun 2013**

SKRIPSI

Disusun sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ilm Politik dalam Prodi Hubungan Internasional dengan Peminatan *Global Transformation* pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disusun oleh :

Dellania Putri Ayuditha

NIM. 135120418113008



PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2018

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERAN *INTERNATIONAL LESBIAN, GAY, BISEXUAL, TRANS AND
INTERSEX ASSOCIATION (ILGA)* DALAM LEGALISASI *SAME-SEX
MARRIAGE* DI BRAZIL PADA TAHUN 2013**

SKRIPSI

Disusun oleh:
Dellania Putri Ayuditha
NIM. 135120418113008

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Tanggal 11 Desember 2018

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping

Reza Triarda, S.Sos., MA
NIK. 2016078902131001

Mely Noviryani, S.Sos., MA
NIK. 2007077409112001

Mengetahui
Ketua Program Studi Hubungan Internasional

Aswin Ariyanto Azis, S.IP, M. DevSt
NIP. 197802202010121001

LEMBAR PENGESAHAN
PERAN *INTERNASIONAL LESBIAN, GAY, BISEXUAL, TRANS AND*
INTERSEX ASSOCIATION (ILGA)* DALAM LEGALISASI *SAME-SEX
***MARRIAGE* DI BRAZIL PADA TAHUN 2013**

SKRIPSI

Disusun Oleh:
Dellania Putri Ayuditha
NIM. 135120418113008

Telah dinyatakan LULUS dalam ujian Sarjana

Pada tanggal 11 Desember 2018

Ketua Majelis Penguji,

Sekretaris Majelis Penguji,

Yustika Citra Mahendra, S.Sos., MA
NIP. 198408232015041001

Dian Mutmaimunah, S.IP., MA
NIP. 197803192005012002

Anggota Majelis Penguji I,

Anggota Majelis Penguji II,

Reza Triarda, S.Sos., MA
NIK. 2016078902131001

Mely Noviryani, S.Sos., MA
NIK. 2007077409112001

Malang, 25 Januari 2018
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik

Prof. Dr. Unti Ludigdo, Ak
NIP. 196908141994021001

LEMBAR PERNYATAAN ORISINILISASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dellania Putri Ayuditha

NIM : 135120418113008

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **PERAN INTERNATIONAL LESBIAN, GAY, BISEXUAL, TRANS AND INTERSEX ASSOCIATION(ILGA) DALAM LEGALISASI SAME-SEX MARRIAGE DI BRAZIL PADA TAHUN 2013** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Malang, 25 Januari 2018

Yang membuat pernyataan

Dellania Putri Ayuditha

NIM 135120418113008

LEMBAR PERSEMBAHAN

"Stop doubting yourself, work hard, and make it happen."

Dalam halaman ini penulis ingin berterimakasih kepada semua pihak atas bantuan, dukungan dan doa yang telah diberikan selama masa penulisan hingga skripsi ini selesai. Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Papa dan Mama. Terimakasih atas dukungan, perhatian dan doanya selama ini. Serta Kakak dan Mbak Hanum yang selalu mendukung, memberikan semangat dan mendoakan selama ini.
2. Pocoyo yang terdiri dari Jasmine, Khansa, Agung, Mira yang telah menjadi sahabat saya selama perkuliahan dan telah memberikan banyak dukungan dan pengalaman yang tidak terlupakan.
3. Eksisiers yang terdiri dari Kak Grace, Diwanda, Kak Nina, Kak Bram, Dodi, Audri, Mona, dan Asha. Terimakasih telah memberikan semangat dan selalu menghibur dengan obrolan yang selalu positif.
4. Anpro yang juga ikut memberikan dukungan, semangat dan doanya selama menjalin pertemanan ini.
5. Seluruh teman-teman Hubungan Internasional 2013 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih untuk semua bantuannya selama perkuliahan dari awal hingga lulus. Semoga kita semua kelak akan menjadi orang yang sukses.
6. Untuk kota Malang yang selalu dirindukan dan membawa suasana yang damai dan ceria.

7. Dan yang terakhir adalah untuk diri saya sendiri karena telah berhasil menyelesaikan satu kewajiban dan tanggung jawab saya sebagai mahasiswa.



ABSTRAK

PERAN *INTERNATIONAL LESBIAN, GAY, BISEXUAL, TRANS AND INTESEX ASSOCIATION* DALAM LEGALISASI *SAME-SEX MARRIAGE* DI BRAZIL TAHUN 2013

Oleh: Dellania Putri Ayuditha

Penulisan karya tulis ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran *International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association* (ILGA) dalam legalisasi *same-sex marriage* di Brazil pada tahun 2013. Brazil dikenal sebagai negara yang anti terhadap orang LGBT, sehingga banyak tindak diskriminasi terhadap orang LGBT di Brazil. Adanya tindakan diskriminasi tersebut mendorong komunitas LGBT untuk berjuang memperoleh hak kesetaraan mereka seperti masyarakat sipil lainnya. Seperti halnya hak untuk menikah dan memperoleh kebebasan. Dalam mencapai hak tersebut terdapat NGO yang dikenal dengan ILGA. NGO ini berdiri untuk memperjuangkan para hak kaum LGBT.

Dalam penelitian ini penulis akan membahas peran ILGA dalam legalisasi *same-sex marriage* di Brazil. Konsep yang digunakan penulis adalah peran NGO yang terdiri dari tiga variable yaitu *implementer*, *catalyst*, dan *partner*. Penulis lebih fokus pada variabel *catalyst*. Melalui variabel tersebut maka nantinya dapat dilihat kegiatan apa saja yang dilakukan oleh ILGA untuk memperoleh dukungan dan mempengaruhi aktor lain dalam legalisasi pernikahan sesama jenis.

Kata kunci: Brazil, diskriminasi, *same-sex marriage*, legalisasi, ILGA, katalis.

ABSTRACT**THE ROLE OF INTERNATIONAL, LESBIAN, GAY, BISEXUAL,
TRANS AND INTERSEX (ILGA) IN THE LEGALIZATION OF SAME-SEX
MARRIAGE IN BRAZIL IN 2013****BY: Dellania Putri Ayudiyha**

This paper aims to see how the role of ILGA in the legalization of same-sex marriage in Brazil in 2013. Brazil is known as the country that anti against LGBT people, so that the large number acts of discrimination against LGBT people in Brazil. The existence of such discrimination actions encourage the LGBT community to fight for their equality rights to marry and gain freedom. In obtaining those rights, there are NGOs, known as ILGA. This NGOs stands for LGBT rights.

On this research I will discuss about the role of ILGA in the legalization of same-sex marriage in Brazil. The concept used is the role of NGOs comprising of three variables: implementer, catalyst, and partner. The author focus on variable of catalyst. Through the variable then later can be seen any activity done by ILGA to received the support and influence of other actors in the legalization of same-sex marriage.

Key words: Brazil, discrimination, same-sex marriage, legalization, ILGA, catalyst.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan ekarunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Tuga Akhir/ Skripsi dengan judul *PERAN INTERNATIONAL LESBIAN, GAY, BISEXUAL, TRANS AND INTERSEX ASSOCIATION (ILGA) DALAM LEGALISASI SAME-SEX MARRIAGE DI BRAZIL PADA TAHUN 2013*. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis menyadari bahwa tuga akhir atau skripsi yang telah disusun oleh penulis masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik maupun saran yang membangun dari para pembaca agar nantinya dapat memperbaiki tulisan, laporan maupun hasil karya yang penulis kerjakan di kemudian hari.

Penulis skripsi ini merupakan salah satu syarat kelulusan sebagai mahasiswa Universitas Brawijaya khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional. Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya berupa kesabaran, kelancaran, perlindungan, ketekunan, dan ketenangan yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi di waktu yang tepat.
2. Papa, Mama, Kakak dan Mbak Hanum serta seluruh keluarga yang selalu memberikan bantuan moril dan materil sampai saat ini.

3. Bapak Aswin Ariyanto Azis, S.IP, M. DevSt selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional yang juga menjadi dosen hubungan internasional. Terimakasih untuk segala saran, kritik dan bantuan yang telah diberikan.
4. Bapak Reza Triarda, S.Sos., MA sebagai dosen pembimbing utama. Terimakasih atas kesabaran selama membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini. Ibu Mely Noviryani, S.Sos., MA selaku dosen pembimbing kedua. Terimakasih atas segala ilmu, saran, bimbingan dan kritik yang telah ibu dan bapak berikan selama ini.
5. Mas Saiful dan Mbak Dita, selaku admin prodi Hubungan Internasional serta akademik FISIP yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan berkas-berkas akademik serta administrasi dan kepada seluruh dosen prodi Hubungan Internasional untuk seluruh ilmu yang telah diberikan,
6. Seluruh teman-teman HI 2013 yang telah mengisi masa perkuliahan penulis selama lebih dari 4 tahun dan seluruh teman-teman baik dimanapun kalian berada.
7. Serta pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu

Malang, 25 Januari 2018

Penulis

DAFTAR ISI

<u>KATA PENGANTAR</u>	ix
<u>ABSTRAK</u>	vii
<u>ABSTRACT</u>	viii
<u>DAFTAR ISI</u>	xi
BAB I:	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
1.2 Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
1.3 Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.4 Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
BAB II	Error! Bookmark not defined.
KERANGKA PEMIKIRAN	Error! Bookmark not defined.
2.1 Studi Terdahulu	Error! Bookmark not defined.
2.2 Kerangka Konseptual	21
2.2.1 Non-Government Organization	21
2.3 Operasionalisasi Konsep	28
2.4 Kerangka Pemikiran	Error! Bookmark not defined.
2.5 Argumen Utama	Error! Bookmark not defined.
BAB III	31
METODE PENELITIAN	31
3.1 Jenis Penelitian	31
3.2 Ruang Lingkup	31
3.3 Teknik Pengumpulan Data	31

3.4 Teknis Analisis Data	Error! Bookmark not defined.
3.5 Sistematika Penulisan	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	Error! Bookmark not defined.
GAMBARAN UMUM	Error! Bookmark not defined.
4.1 Kondisi LGBT di Brazil.....	Error! Bookmark not defined.
4.2 Sejarah terbentuknya ILGA	44
4.3 Sistem Parlemen.....	50
4.4 Politicians Brazil take a step to recognizing same sex marriage.....	57
BAB V	64
Peran ILGA dalam legalisasi <i>same-sex marriage</i> di Brazil	64
5.1 Legalisasi <i>same-sex marriage</i> di Brazil	64
5.2 Peran ILGA	65
5.2.1 ILGA meluncurkan kampanye untuk memerangi <i>homophobia</i> dan <i>transphobia</i>	65
5.2.2 ILGA melakukan konferensi di Brazil untuk membahas terkait memperjuangkan kesetaraan orang LGBT	66
5.2.3 ILGA melakukan kampanye untuk memperoleh dukungan terkait <i>The Brazilian Resolution</i>	70
5.2.4 ILGA melakukan kampanye <i>same-sex marriage</i>	75
BAB VI	80
PENUTUP	80
6.1 Kesimpulan	80
6.2 Saran dan Rekomendasi	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Negara-negara yang melegalkan pernikahan sesama jenis	5
Gambar 1.2 <i>Views on Same-sex Marriage in Latin America</i>	8
Gambar 4.1 Data populasi LGBT di Brazil	38



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Korban Kekerasan LGBT di Brazil.....	10
Tabel 2.1 Studi Terdahulu.....	20
Tabel 5.3 Data Hambatan yang Dialami Oleh Kaum Lesbian.....	85





LEMBAR PERNYATAAN ORISINILISASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dellania Putri Ayuditha

NIM : 135120418113008

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **PERAN INTERNATIONAL LESBIAN, GAY, BISEXUAL, TRANS AND INTERSEX ASSOCIATION(ILGA) DALAM LEGALISASI SAME-SEX MARRIAGE DI BRAZIL PADA TAHUN 2013** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Malang, 25 Januari 2018

Yang membuat pernyataan



Dellania Putri Ayuditha

NIM 135120418113008

LEMBAR PENGESAHAN
PERAN INTERNASIONAL LESBIAN, GAY, BISEXUAL, TRANS AND
INTERSEX ASSOCIATION (ILGA) DALAM LEGALISASI SAME-SEX
MARRIAGE DI BRAZIL PADA TAHUN 2013

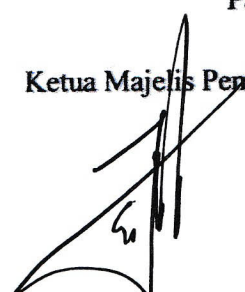
SKRIPSI

Disusun Oleh:
Dellania Putri Ayuditha
NIM. 135120418113008


Telah dinyatakan LULUS dalam ujian Sarjana

Pada tanggal 11 Desember 2018

Ketua Majelis Penguji,


Yustika Citra Mahendra, S.Sos., MA
NIP. 198408232015041001


Sekretaris Majelis Penguji,


Dian Mutmainah, S.IP., MA
NIP. 197803192005012002

Anggota Majelis Penguji I,


Reza Triarda, S.Sos., MA
NIK. 2016078902131001

Anggota Majelis Penguji II,


Mely Noviryani, S.Sos., MA
NIK. 2007077409112001

Malang, 25 Januari 2018
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik



Prof. Dr. Unti Ludigdo, Ak
NIP. 196908141994021001

LEMBAR PERSETUJUAN
PERAN *INTERNATIONAL LESBIAN, GAY, BISEXUAL, TRANS AND*
INTERSEX ASSOCIATION (ILGA)* DALAM LEGALISASI *SAME-SEX
***MARRIAGE* DI BRAZIL PADA TAHUN 2013**

SKRIPSI

Disusun oleh:
Dellania Putri Ayuditha
NIM. 135120418113008

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Tanggal 11 Desember 2018

Pembimbing Utama,


Reza Triarda, S.Sos., MA
NIK. 2016078902131001

Pembimbing Pendamping


Mely Noviryani, S.Sos., MA
NIK. 2007077409112001

Mengetahui

Ketua Program Studi Hubungan Internasional



Aswin Ariyanto Azis, S.IP, M. DevSt
NIP. 197802202010121001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak asasi manusia atau yang dikenal dengan *human right* merupakan sesuatu yang telah melekat dalam diri setiap manusia, yang mana hak manusia sendiri memiliki sifat yang universal. Hak manusia tidak memandang ras, jenis kelamin, kewarganegaraan, etnisitas, bahasa, agama, dan status lainnya. Hak asasi manusia sendiri mencakup hak untuk memperoleh sebuah kehidupan dan kebebasan, kebebasan dari perbudakan dan penyiksaan, kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk memperoleh sebuah pendidikan dan pekerjaan, dan lain sebagainya. Setiap manusia di bumi ini berhak atas hak-hak mereka tanpa adanya diskriminasi. Hal tersebut telah tercantum di dalam *Declaration Human Right* oleh PBB pada tahun 1948.¹

PBB merupakan badan organisasi internasional yang mempunyai tanggung jawab utama dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia. Sejak dituangkannya di dalam *Declaration of Human Right*, PBB dengan rajin melindungi hak asasi manusia melalui instrument hukum dan kegiatan secara langsung. Kantor Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) telah mendukung komponen hak asasi manusia dari misi menjaga perdamaian dunia, dan memiliki kantor yang terletak di beberapa pusat negara dan regional. Selain itu PBB juga dibantu oleh instrumen hukum yang bertugas untuk melindungi hak asasi manusia. Tidak hanya PBB saja yang melindungi hak asasi manusia akan tetapi terdapat badan PBB lainnya yang juga bertanggung jawab atas perlindungan hak asasi manusia di antaranya yaitu Dewan Keamanan, Komite Ketiga Majelis Umum, dan berbagai badan PBB lainnya.²

¹ *Universal Declaration of Human Right* diambil dari <http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/> diakses pada tanggal 20 Juli 2017.

² *Protect Human Right* diambil dari <http://www.un.org/en/sections/what-we-do/protect-human-rights/index.html> diakses pada tanggal 20 Juli 2017.

Fenomena LGBT merupakan sebuah fenomena yang saat ini terus mengalami perkembangan dan masih menjadi pembahasan yang hangat bagi masyarakat dunia. Adanya fenomena ini juga menimbulkan pro dan kontra. Tidak hanya itu adanya kaum LGBT juga menimbulkan berbagai tindak diskriminasi dan ancaman bagi kaum tersebut diberbagai Negara. Orang LGBT sering kali menjadi sasaran tindak kejahatan bagi mereka yang membenci kaum tersebut.³ Terdapat lebih dari 600 laporan tentang orang *transgender* yang terbunuh di hampir 50 negara sejak Januari 2008. Banyaknya kasus yang terjadi atas pembunuhan bagi para kaum LGBT dan hal tersebut dianggap tidak adanya keadilan bagi mereka.⁴

Oleh sebab itu adanya tindak kekerasan yang terus meningkat dan menjadikan hal itu sebuah ancaman bagi kaum LGBT, terdapat sebuah organisasi yang berdiri untuk melindungi hak *gender* mereka. *International Lesbian, Gay, Trans and Intersex Association (ILGA)* merupakan sebuah organisasi nasional dan lokal yang berdedikasi untuk mencapai hak yang sama bagi para kaum LGBT di seluruh dunia. ILGA sendiri didirikan pada tahun 1978 dan memperoleh status konsultatif di Dewan ECOSOC PBB dan menerbitkan laporan tahunan dan memetakan undang-undang kriminalisasi atau perlindungan manusia berdasarkan orientasi seksual atau mengakui hubungan mereka. Organisasi ini mewakili 1,200 organisasi anggota dari 132 negara yang berbasis di enam wilayah, yaitu Afrika, Asia, Eropa, Amerika Latin, Amerika Utara dan Oseania.⁵ ILGA sendiri juga melakukan pendaftaran bagi masyarakat umum jika ingin bergabung menjadi anggota organisasi tersebut atau hanya memberikan donasi. Selain itu ILGA juga mempunyai jaringan dengan organisasi lainnya seperti ILGA Asia, ILGA Europe,

³ *US Hate Crimes Against LGBT* diambil dari <https://www.nytimes.com/interactive/2016/06/16/us/hate-crimes-against-lgbt.html> diakses pada tanggal 20 Juli 2017.

⁴ *Crimes Changed LGBT World* diambil dari <https://www.advocate.com/arts-entertainment/advocate-45/2012/05/07/12-crimes-changed-lgbt-world?pg=1#article-content> diakses pada tanggal 20 Juli 2017.

⁵ *About Us* diambil dari <http://ilga.org/about-us> diakses pada tanggal 20 Juli 2017

ILGALAC, ILGA Nort America, ILGA Oceania, Pan Africa ILGA, Bisexual Secretariat, Intersex Secretariat, Trans Secretariat, dan Women's Secretariat.⁶

Tujuan ILGA sendiri adalah dimana hak asasi kaum LGBT dapat hidup dalam kebebasan dan persamaan, terlepas dari orientasi seksual, identitas *gender* atau ekspresi *gender* dan karakteristik seks mereka.⁷ Selain itu ILGA mempunyai misi untuk bekerja mencapai kesetaraan, kebebasan dan keadilan bagi orang-orang LGBT melalui advokasi, tindakan kolaboratif, dan dengan mendidik dan menginformasikan institusi, pemerintah, media dan masyarakat sipil. Memberdayakan anggota dan organisasi hak asasi manusia lainnya dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia, dan untuk memfasilitasi kerjasama diantara wilayah dan anggota ILGA.⁸

Salah satu kegiatan yang dilakukan ILGA ini adalah mengadakan konferensi dunia. Konferensi yang diadakan oleh ILGA merupakan wadah bagi organisasi tersebut untuk berkumpul dengan para aktivis LGBT di seluruh dunia yang mana di dalam konferensi tersebut membahas tentang masa depan gerakan mereka, membangun aliansi kemitraan serta secara kolektif menyusun cara untuk meningkatkan persamaan di seluruh dunia. Konferensi ILGA ini telah diadakan sejak awal organisasi ini dibangun.⁹

Dalam kegiatannya, pada tahun 2003 negara Brasil mengeluarkan sebuah resolusi mengenai orientasi seksual. Adanya resolusi Brasil banyak mengejutkan masyarakat dikarenakan sebagian besar negara akan sangat kecil memberikan persetujuan terhadap resolusi tersebut.¹⁰ Sebagai organisasi internasional ILGA tentu saja mendukung adanya resolusi Brasil yang

⁶ *Ibid.*

⁷ *Vision Mission Core Values* diambil dari <https://www.ilga-europe.org/who-we-are/what-ilga-europe/vision-mission-core-values> diakses pada tanggal 20 Juli 2017.

⁸ *What We Do* diambil dari <http://ilga.org/what-we-do> diakses pada tanggal 20 Juli 2017.

⁹ *World Conference*, diambil dari <http://ilga.org/world-conferences> diakses pada tanggal 20 Juli 2017.

¹⁰ ILGA. 2009. *The Brazilian Resolution and Beyond*, diambil dari <http://ilga.org/the-brazilian-resolution-and-beyond/> diakses pada tanggal 18 Oktober 2017.

membahas tentang mengenai orientasi seksual untuk memperjuangkan hak-hak seksual mereka. Dengan begitu ILGA membantu dalam mengajukan petisi kepada beberapa negara di dunia. Resolusi tersebut akan memperoleh hak suara dari 53 negara, akan tetapi negara-negara lain yang tidak memberikan hak suara mereka dapat berpartisipasi dalam debat tersebut.¹¹

Pada saat ini sudah sekitar 20 negara di dunia yang telah melegalkan pernikahan sesama jenis di negaranya.¹² Benua yang pertama kali melegalkan pernikahan sesama jenis yaitu Benua Eropa. Diawali dari negara Belanda yang telah melegalkan pada bulan April 2001. Setelah itu 12 negara lainnya di Eropa menyusul kebijakan tersebut. Tidak hanya itu beberapa negara di Benua Eropa juga mengizinkan kaum homoseksual untuk terjun kedalam kemitraan sipil.¹³

Selain Benua Eropa, Benua Amerika pun mengikuti jejak tersebut salah satunya di negara bagian Amerika Latin yang telah melegalkan pernikahan sesama jenis, yaitu: Mexico, Venezuela, Columbia, Ecuador, Peru, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Panama, Dominican Republic, Puerto Rico, dan Brazil.¹⁴ Di bawah ini merupakan tabel dari negara-negara yang melegalkan *same marriage*.

Gambar 1.1 Negara-negara yang melegalkan pernikahan sesama jenis

¹¹ ILGA. 2009. *Supporting The Brazilian Resolution*, diambil dari <http://ilga.org/supporting-the-brazilian-resolution/> diakses pada tanggal 18 Oktober 2017.

¹² Kompas. 2017. Homoseksualitas, dari Hukuman Mati Hingga Pernikahan Sejenis diambil melalui <http://internasional.kompas.com/read/2017/05/24/14105151/homoseksualitas.dari.hukuman.mati.hingga.pernikahan.sejenis> diakses pada tanggal 20 Juli 2017.

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ Pew Research Center. 2015. *Same-sex marriage makes some legal in Latin America* diambil dari <http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/06/25/same-sex-marriage-makes-some-legal-gains-in-latin-america/> diakses pada tanggal 20 Juli 2017.

Countries That Allow Gay Marriage				
Argentina (2010)	Denmark (2012)	Greenland (2015)	New Zealand (2013)	Spain (2005)
Belgium (2003)	England / Wales (2013)	Iceland (2010)	Norway (2009)	Sweden (2009)
Brazil (2013)	Finland (2015)	Ireland (2015)	Portugal (2010)	United States (2015)
Canada (2005)	France (2013)	Luxembourg (2014)	Scotland (2014)	Uruguay (2013)
Colombia (2016)	Germany (2017)	The Netherlands (2000)	South Africa (2006)	
Countries Where Gay Marriage is Legal in Some Jurisdictions				
Mexico (2009)				

Sumber: *Pewforum, Gay Marriage Around the World*, diakses melalui <http://www.pewforum.org/2017/06/30/gay-marriage-around-the-world-2013/>

Brazil merupakan salah satu negara dari lima negara Amerika Latin yang telah melegalkan kebijakan sesama jenis ini sejak 16 Mei 2013 lalu, yang diikuti dengan keputusan dari Mahkamah Agung.¹⁵ Negara Brazil merupakan negara di Amerika Latin yang mempunyai persentase sebanyak 45% yang mendukung adanya pernikahan sesama jenis tersebut. Adanya keputusan yang dilakukan Mahkamah Agung merupakan suatu langkah penting bagi kaum LGBT di negara tersebut. Sepuluh hakim telah memberikan keputusannya dalam memberikan atau mengabulkan hak-hak kesetaraan bagi kaum LGBT untuk melangsungkan sebuah pernikahan.¹⁶ Selain itu legalisasi yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung disetujui dengan adanya Resolusi 175 yang di dalamnya membahas terkait pernikahan bagi pasangan sesama jenis

¹⁵ Estadão. 2013. *CNJ Obriga Cartorios a Celebrar Casamento Entre Homossexuais* diakses melalui <http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,cnj-obriga-cartorios-a-celebrar-casamento-entre-homossexuais,1031678> pada 20 Juli 2017.

¹⁶ Amnesty International. 2011. *Brazil Supreme Court Recognizes Same-sex Civil Unions* diakses dari <https://www.amnestyusa.org/victories/brazil-supreme-court-recognizes-same-sex-civil-unions/> pada tanggal 20 Juli 2017.

di Brasil.¹⁷ Hal tersebut juga disampaikan oleh Guadapule Marengo seorang Wakil Direktur Amerika.

*This is an historic moment for same-sex couples in Brazil. We welcome this development and hope that this landmark decision will lead towards full protection of the rights of LGBT people in Brazil. Hopefully the Brazilian move will influence other Latin American countries.*¹⁸

Selain itu Toni Reis sebagai kepala Asosiasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan TransBrasil (ABGLT) juga menyampaikan tanggapannya terhadap keputusan Mahkamah Agung mengenai legalisasi pernikahan sesama jenis.

*The ruling is an important victory for the gay and lesbian community – and for democracy in Brazil. Prior to the decision, same-sex unions could only be formalized by means of a business contract, as if the couple were two partners in a firm. The Federal Congress is dragging its feet and has not voted a single bill to promote equal rights for our community. We need to educate people to have more respect for human diversity.*¹⁹

Tidak hanya itu Hakim Ellen Gracie juga memberikan tanggapan terkait keputusan yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung terkait pernikahan sesama jenis ini:

*“The recognition made by the court today responds to the rights of a group of people who has long been humiliated, whose rights have been ignored, whose dignity has been offended, whose identity was denied, and whose freedom was overwhelmed”*²⁰

Pada dasarnya sebelum dilegalkannya pernikahan sesama jenis di Brazil, undang-undang pernikahan yang berlaku hanyalah untuk pasangan heteroseksual saja akan tetapi setelah adanya keputusan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung terkait pernikahan sesama jenis tersebut maka undang-undang pernikahan yang berlaku di Brazil tidak hanya diartikan untuk pasangan

¹⁷ Portal STF International diambil dari http://www2.stf.jus.br/portalStfInternacional/cms/destaquesClipping.php?sigla=portalStfDestaque_en_us&idConteudo=179046 diakses pada tanggal 17 Desember 2018.

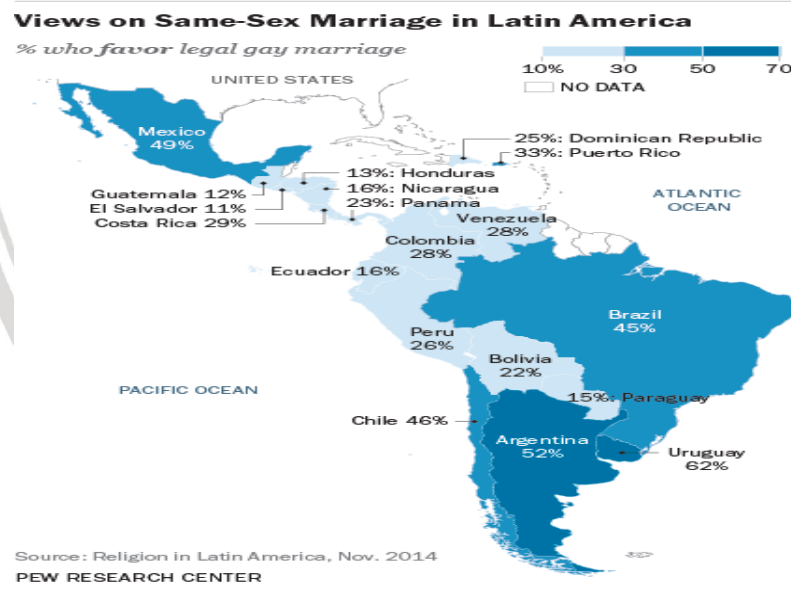
¹⁸ *Loc.cit.*

¹⁹ *Loc.cit.*

²⁰ *Brazil Supreme Court Legalizes Same Sex Civil Unions* diambil melalui <https://www.amnestyusa.org/brazils-supreme-court-legalizes-same-sex-civil-unions/> diakses pada tanggal 20 November 2018.

heteroseksual saja akan tetapi juga berlaku bagi pasangan homoseksual. Pengadilan Brazil berpendapat bahwa di dalam dokumen hukum Brazil menyatakan bahwa undang-undang pernikahan dalam istilah heteronormatif dan di dalam undang-undang tersebut juga tidak menunjukkan bahwa hak-hak bagi kaum sesama dapat di tolak untuk melangsungkan pernikahan.²¹ Selain itu juga dulunya pasangan sesama jenis tidak dapat melangsungkan pernikahan dan hakim menolak hal tersebut akan tetapi saat ini pernikahan tersebut dapat dilakukan seperti halnya hak para serikat yang stabil, memperoleh hak pensiun, fasilitas kesehatan, adopsi, dan lain sebagainya. Maka pada saat ini pasangan sesama jenis berhak memperoleh sertifikat yang menyatakan bahwa adanya pernikahan yang resmi.²² Seorang notaris pun tidak dapat menolaknya karena jika menolak untuk mengeluarkan sertifikat tersebut maka dianggap melanggar hukum.

Gambar 1.2 Views on Same-sex Marriage in Latin America



²¹ Javier Coralles, *Brazil's Recognition of Same-sex Union*, 2011, diakses dari https://www.huffingtonpost.com/javier-corrales/brazils-recognition-of-sa_b_862691.html diambil pada tanggal 20 November 2018

²² Caulfield, Sueann. 2011. *The Recent Supreme Court Ruling on Same-Sex Unions in Brazil: A Historical Perspective*. Universitas of Michigan. Vol 1, Issue 1.

Sumber: *Same Marriage Makes Some Legal Gains in Latin America* diakses dari <http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/06/25/same-sex-marriage-makes-some-legal-gains-in-latin-america/>

Pada penelitian ini penulis memilih negara Brasil karena Brasil merupakan negara terbesar dan terpadat di Amerika Latin.²³ Brasil juga dikenal sebagai negara dengan sejarah agama Katolik yang kaya yang mana disandingkan dengan masyarakat liberal secara seksual. Negara Brasil sendiri berinteraksi dengan para komunitas LGBT dengan cara yang berbeda dan hal tersebut juga menimbulkan suatu pertentangan.²⁴ Meskipun homoseksual telah legal dan diakui oleh negara Brasil sejak tahun 1823, Brasil sendiri juga dikenal sebagai negara pelanggaran terburuk dengan catatan tinggi tentang kejahatan dan diskriminasi kebencian, dan sebagai dunia pemimpin dengan dorongan domestik dan global terkait hak LGBT.²⁵

Tindak kekerasan sering terjadi seperti pada tahun 2008 dimana adanya tindak kekerasan yang dilakukan para homophobia terhadap presiden penyelenggara *Sao Paulo Asosiasi Pride Gay* yaitu Alexandre Peixe dos Santos. Para homophobia tersebut melakukan pemukulan secara brutal dan dilatar belakangi oleh kebencian terhadap kaum LGBT.²⁶ Pada tahun 1980 hingga 2006 terjadi pembunuhan terhadap gay dan lesbian yang memakan korban sebanyak 2.680 jiwa yang juga dilatar belakangi dengan orientasi seksual mereka.²⁷ Selanjutnya pada tahun 2004 terdapat 63% orang LGBT mengalami diskriminasi, pada tahun 2005 sekitar 16,6% menderita kekerasan fisik dan di sekolah mencapai angka 40%. Sehingga hal ini menjadikan Brasil sebagai negara yang tinggi terhadap diskriminasi daripada Eropa dan Amerika Serikat.²⁸

²³ *The World Factbook* diambil <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/br.html> diakses pada tanggal 18 Oktober 2018.

²⁴ Rosenberg, Adrienne. *The Brazilian Paradox: The Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Battle for Human Right.*, hal.16.

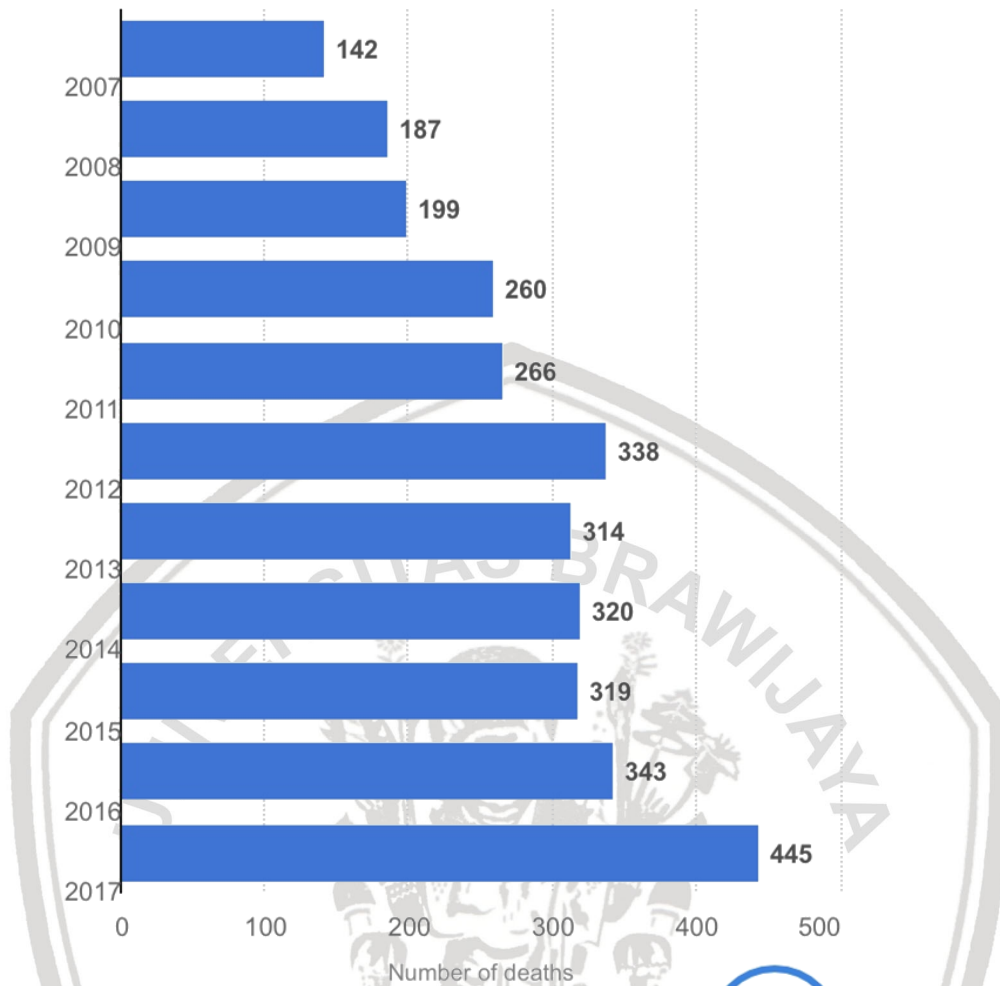
²⁵ *Loc.cit.*

²⁶ *Loc.cit.*

²⁷ *Ibid.*, hal.17.

²⁸ *Loc.cit.*

Tabel 1.1 Data korban kekerasan LGBT di Brazil



Sumber Statista, “*Number of Violent Deaths of LGBT People in Brazil from 2007-2017*” diambil dari <https://www.statista.com/statistics/799411/lgbt-people-violent-deaths-brazil/>.

Tidak hanya itu Brasil merupakan negara yang terkenal dengan *Gay Parade* yang dijuluki dengan *São Paulo Gay Pride Parade*. *Gay Parade* ini merupakan parade terbesar di dunia yang mana sudah ada sejak tahun 1997. Hal ini merupakan suatu hal keunikan yang dimiliki oleh negara Brasil dimana keunikan tersebut menyangkut tentang dukungan atau memperingati hari para kaum LGBT. Perayaan parade gay ini dilaksanakan di 10 blok kota yang berada di jalan Paulista. Selain itu parade ini diikuti dan dihadiri oleh tiga juta orang. Para peserta yang mengikuti parade ini wajahnya dihias dengan menggunakan hiasan warna pelangi dan parade ini

fokus terhadap ancaman fundamentalis *religious* yang dinilai akan mengambil hak-hak para kaum LGBT yang telah diperoleh.²⁹

Serta terdapat fakta bahwa Edgar de Souza seorang Wali Kota Lins sebuah kota kecil di Brasil telah melangsungkan pernikahan didepan teman dan keluarganya dengan pasangan sesama jenisnya yang bernama Alessandro Luciano Trindade. Mereka telah menjalin hubungan selama 13 tahun hingga sampai saat ini mereka telah meresmikan pernikahan keduanya walaupun mereka memperoleh surat kebencian akan tetapi mereka juga memperoleh sebuah dukungan melalui media sosial. Pernikahan sesama jenis ini telah legal di Brasil sejak 2013 setelah diputuskannya oleh Mahkamah Agung. Dalam tiga tahun pertama setelah peresmian tersebut terdapat kurang lebih 14.000 pasangan sesama jenis yang mendaftarkan pernikahan mereka.³⁰

Urgensi yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini adalah bahwa Brasil merupakan negara yang dikenal dengan tingkat kejahatan terhadap kaum LGBT cukup tinggi akan tetapi dibalik itu semua Brasil juga telah berhasil melegalkan kebijakan pernikahan sesama jenis pada tahun 2013. Selain itu juga organisasi ILGA juga berperan dalam proses pengambilan kebijakan tersebut. Berdasarkan penjabaran di atas terkait kebijakan yang telah di sahkan oleh Mahkamah Agung Brasil mengenai pernikahan sesama jenis dan peran ILGA dalam mendorong legalisasi kebijakan tersebut sehingga menimbulkan pergejolakan dalam masyarakat maupun dunia global. Maka penulis mengambil judul “Peran ILGA dalam Legalisasi *Same Marriage* di Brazil Pada Tahun 2013”.

²⁹ Gohl, Cody, Newnownext. 2017. *World's Largest Pride Draws Millions of Spectators To Saoi Paulo, Brazil*, diambil dari <http://www.newnownext.com/sao-paulo-gay-pride-parade/06/2017/> diakses pada tanggal 02 November 2017.

³⁰ Shasta, Darlington, CNN. 2017. *Trailblazing Brazilian mayor marries same-sex partner*, diakses melalui <http://edition.cnn.com/2017/03/07/americas/edgar-de-souza-lins-brazil-mayor-gay-marriage/index.html> diambil pada tanggal 20 Juli 2017.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran dari latar belakang di atas maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana peran ILGA dalam Legalisasi *Same-sex Marriage* di Brazil pada tahun 2013?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran ILGA dalam mendorong legalisasi kebijakan mengenai *Same Marriage* di Brazil pada tahun 2013.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini akan membawa manfaat baik dalam segi akademis maupun segi praktis, yaitu:

Segi Akademis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam membangun pemikiran dan pengembangan ilmu Hubungan Internasional khususnya dan ilmu pengetahuan umum lainnya.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi mahasiswa studi Ilmu Hubungan Internasional yang ingin melakukan penelitian terkait pada fenomena ini.
3. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca mengenai peran organisasi internasional untuk mempengaruhi suatu keputusan kebijakan tersebut dibuat di Brazil yang ditujukan untuk kaum minoritas di Brazil yaitu kaum Lgbt untuk memperjuangkan kesetaraan dan hak mereka untuk melakukan pernikahan sesama jenis pada tahun 2013.

Segi Praktis

1. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam membangun pemikiran mengenai bagaimana individu maupun sebuah kelompok mampu

mempengaruhi suatu kebijakan yang telah berlaku dalam suatu negara untuk mensejahterakan warga negara suatu negara ataupun untuk negara itu sendiri.



BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam melakukan penelitian ini, maka penulis akan menggunakan studi terdahulu sebagai acuan dan perbandingan atas penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Selanjutnya, penulis akan menjelaskan konsep yang digunakan penulis untuk menganalisis kasus.

2.1 Studi Terdahulu

Studi terdahulu pertama di ambil dari jurnal milik Sueann Caufield yang berjudul “*The Recent Supreme Court Ruling on Same-Sex Unions in Brazil: A historical Perspective.*” Di dalam jurnalnya dijelaskan bahwa pada tanggal 5 Mei tahun 2011 lalu Mahkamah Agung Brazil telah memutuskan keputusannya untuk mengakui *Same-Sex Unions* dan memberikan hak yang sama terhadap mereka. Adanya keputusan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Brazil bahwa pasangan sesama jenis telah diperbolehkan menikah setara dengan Undang-Undang tahun 1998. Negara Brazil merupakan negara ke lima di wilayah Amerika Latin yang melegalsasikan pernikahan sesama jenis. Hal ini merupakan sebuah kemenangan bagi negara Brazil. Selama satu dekade ini baik negara maupun pengadilan telah mendukung kebebasan terhadap orientasi seksual karena hal tersebut dianggap sebagai hak asasi manusia yang mendasar. Pada tahun 2003 Diplomat Brazil juga mengajukan terkait resolusi yang dimana resolusi tersebut untuk mendukung para kaum Lgbt ke *United Nations* dan *Organizations of American State*.¹

Pemerintah Federal telah menciptakan sebuah kurikulum yang mana kurikulum tersebut untuk mendidik anak-anak terhadap isu LGBT. Selain itu juga beberapa negara bagian Brazil telah membuat undang-undang anti diskriminasi. Bentuk dukungan lain yang diberikan oleh

¹ Caulfield, Sueann. 2011. *The Recent Supreme Court Ruling on Same-Sex Unions in Brazil: A Historical Perspective*. Universitas of Michigan. Vol 1, Issue 1,. H. 7.

pemerintah federal adalah menyediakan keuangan dan dukungan terhadap parade tahunan kebanggaan kaum LGBT yang menjadi sebuah simbol mereka. Negara Brazil merupakan negara pemenang kedua di dunia pemegang parade *gay* tahunan terbesar di São Paulo yang mana telah dikunjungi lebih dari 3 juta penonton sejak tahun 2007. Adanya kemenangan bagi kaum LGBT bukanlah sebuah akhir bagi mereka setelah memperjuangkan hak mereka selama 20 tahun terakhir akan tetapi mereka akan tetap berjuang bahwa kemenangan yang diperoleh diharapkan dapat dikit demi sedikit menghilangkan tindak diskriminasi terhadap kaum mereka.²

Di legalkannya pernikahan sesama jenis di Brazil menimbulkan perdebatan paradoks. Akan tetapi beberapa sebagian memuji tentang karya para aktivis LGBT dalam membuat Negara untuk mendukung dan melegalkan mereka, selain itu juga terdapat argumen lain terhadap kaum Lgbt ini terhadap agama dimana agama menentang adanya legalisasi pernikahan terhadap kaum LGBT tersebut. Sebagian orang beranggapan bahwa gerakan LGBT terlalu bergantung terhadap Negara yang dimana selalu menggunakan properti seperti bendera pelangi untuk mendukung mereka.³

Organisasi-organisasi LGBT telah ada sejak 1970an dan adanya organisasi tersebut berhasil dalam memperjuangkan hak-hak mereka dengan melakukan serangkaian gerakan sosial dan gerakan lokal dan global. Organisasi ini berfokus kepada perayan keragaman sebagai tradisi Brazil yang mana hal tersebut sebagai hak asasi manusia universal melalui kampanye kesehatan masyarakat dan parade kebanggaan *gay*. Strategi ini berhasil mengumpulkan dukungan dari Negara Brazil dan menciptakan ruang sosial bagi kaum LGBT.⁴

Untuk studi terdahulu kedua penulis menggunakan tesis milik Lucas Paoli Itaborahy yang berjudul "*LGBT RIGHT IN BRAZIL: An analysis of public policies established by the Federal*

² *Loc.cit.*

³ *Loc.cit.*

⁴ *Ibid.*, Hal. 8.

Government to recognize the human right of the LGBT community. Brazil merupakan negara yang dikenal secara internasional karena negara tersebut memiliki masyarakat liberal yang mana masyarakat tersebut terbuka terhadap orientasi seksual dan kebebasan berekspresi yang tinggi. Akan tetapi hal tersebut berbanding terbalik dengan sikap sebagian masyarakat Brazil terhadap kelompok minoritas di negara tersebut yaitu para kaum LGBT. Masyarakat Brazil sering kali melakukan tindak kekerasan dan diskriminatif terhadap kelompok tersebut dan diperparah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, pendidikan, dan realitas ketidaksetaraan rasial.⁵

Kejahatan dan kebencian yang terjadi terhadap kaum LGBT setidaknya sekitar 150 orang LGBT terbunuh setiap tahunnya. Target utama yang menjadi korban kejahatan tersebut adalah waria karena stigmatisasi sosial dan marginalisasi dan keterlibatan mereka terhadap prostitusi dan narkoba. Bentuk diskriminasi yang terjadi yaitu kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan diskriminasi berdasarkan orientasi seksual mereka.⁶ Brazil sendiri juga tidak memiliki undang-undang terkait untuk melindungi kaum LGBT terhadap diskriminasi identitas gender.⁷ Terlepas itu pemerintah federal secara konsisten menerima komunitas LGBT dan telah membentuk sebuah kebijakan hak asasi manusia dan anti diskriminatif. Dukungan tersebut telah diberikan oleh pemerintah pada pertengahan tahun 90-an. Akan tetapi semua upaya yang telah dilakukan tidak akan berjalan jika tidak ada campur tangan dari gerakan LGBT nasional itu sendiri.⁸

Gerakan LGBT di Brazil dianggap sebagai salah satu gerakan tertua dan terbesar di Amerika Latin dan gerakan ini paling banyak terlibat secara politik.⁹ Kegiatan pertama yang dilakukan yaitu sebuah bahasan antiauthoritarian yang kuat dan bertujuan untuk memperkuat

⁵ Lucas Paoli Itaborahy. 2012. *LGBT Right in Brazil: An analysis of the public policies established by the Federal Government to recognize the human rights of the LGBT community*. University of Gothenburg. Hal 9.

⁶ *Loc.cit.*

⁷ *Ibid.* hal 10.

⁸ *Loc.cit.*

⁹ *Loc.cit.*

identitas homoseksual yang pada awalnya terinspirasi oleh ideologi sosialis dan anarkis. Kampanye yang dilakukan dimulai pada tahun 1970-an yang bertujuan untuk memperjuangkan kebebasan homoseksual pada pertarungan untuk sebuah perubahan budaya dan seksual.¹⁰

Aktivitas gerakan LGBT mengalami perubahan peran yang mana aktivis bertindak sebagai pelaksana kebijakan negara, mendapat manfaat dari reformasi neoliberal dan menerima dana dari pemerintah untuk bekerja dalam pencegahan HIV. Lula sendiri juga mengubahnya menjadi sebuah kebijakan dan mengundang aktivis untuk membantu dalam perumusan kebijakan yang ditujukan kepada mereka.¹¹ Dalam pemerintahan sebelumnya aktivis LGBT hanya bersifat konsultatif akan tetapi hal tersebut telah berubah semenjak pemerintahan dipegang oleh Lula. Aktivis LGBT ikut berpartisipasi aktif dan representatif dalam gerakan LGBT.¹²

Untuk studi terdahulu ketiga penulis menggunakan buku milik David Lewis dan Nazneen Kanji yang berjudul "*Non-Governmental Organization and Development*". Di dalam bukunya David dan Nazneen menjelaskan bahwa NGO peran NGO dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu *implementer*, *catalyst*, dan *partner* dalam menjalankan kegiatannya untuk memberikan dan menyediakan sebuah bantuan terhadap isu tertentu. Studi kasus yang digunakan Lewis di dalam bukunya yaitu *Fundacion Trasca AC* yang mana NGO tersebut lebih berfokus pada pengembangan terhadap kawasan terpencil. NGO itu bertujuan untuk memberikan bantuan untuk salah satu pedesaan yang berada di kawasan Mexico tersebut yang mana tidak dijangkau oleh pemerintah.¹³

David juga menjelaskan bagaimana peran *catalyst* dalam aktivitasnya NGO bekerja dalam pembangunan dan meningkatkan profil mereka di level lokal seperti halnya upaya dalam

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.* hal 53.

¹² *Ibid.*

¹³ David Lewis and Nazneen Kanji. 2009. *Non-Government Organization and Development*. Routledge. hal 96.

rekontruksi di Indonesia, India, Thailand, dan Sri Lanka setelah terjadinya bencana yang melanda di negara-negara tersebut pada tahun 2004. Kegiatan tersebut juga berupa kampanye internasional untuk reformasi bantuan dan perdagangan seperti “*Make Poverty History*”.¹⁴

Tabel 2.1 Studi Terdahulu

Studi Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
Sueann Caufield, “ <i>The Recent Supreme Court Ruling on Same-Sex Unions in Brazil: A historical Perspective.</i> ”	<ul style="list-style-type: none"> • Isu yang diambil sama dengan penulis, mengenai <i>Same-sex Marriage</i> di Brazil. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan teori berbeda dengan penulis. Caufield lebih menggunakan perspektif historical.
Lucas Paoli Itaborahy, <i>LGBT RIGHT IN BRAZIL: An analysis of public policies established by the Federal Government to recognize the human right of the LGBT community.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas tentang isu hak asasi dan kesetaraan bagi kaum minoritas LGBT. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan konsep atau teori pada penelitian. Lucas lebih menggunakan public policies.
David Lewis dan Nazneen Kanji, <i>Non-Governmental Organization and Development.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan konsep peran NGO milik David Lewis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Isu yang diambil berbeda dengan penulis. Dimana studi terdahulu milik David membahas tentang isu pembangunan.

¹⁴ *Ibid.* hal 1.

2.2 Kerangka Konseptual

Adanya fenomena yang terjadi dan yang telah dijelaskan di latar belakang maka penulis akan mendeskripsikan sebuah fenomena tersebut dengan konsep. Konsep ini akan digunakan penulis guna membantu penulis untuk menjelaskan sebuah fakta fenomena yang telah terjadi dengan merelevankan dengan teori-teori logis yang terkandung di dalamnya.

2.2.1 Non-Government Organization

Dalam menganalisa peran *International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Assosiation (ILGA)* dalam legalisasi *same-sex marriage* di Brazil pada tahun 2013 maka penulis menggunakan konsep Non-Government Organization milik David Lewis dan Nazneen Kanji. Dalam bukunya yang berjudul *non-government organization and development* David Lewis menjelaskan bahwa selama dua dekade terakhir, *non-government organization* yang bekerja dalam pembangunan telah meningkatkan profil mereka dalam level lokal, nasional maupun internasional. NGO hadir untuk dikenal sebagai aktor penting dalam bidang pembangunan. NGO juga dikenal sebagai suatu aktor organisasi yang melakukan satu atau dua kegiatan utamanya, yaitu memberikan sebuah layanan kepada masyarakat yang membutuhkan, mengorganisir advokasi kebijakan dan melakukan kampanye publik untuk sebuah perubahan. Di dunia yang semakin berkembang ini NGO juga semakin aktif dalam berbagai peran lainnya seperti pembangunan demokrasi, resolusi konflik, hak asasi manusia, pelestarian budaya, aktivisme lingkungan, analisis kebijakan dan penyedia informasi.¹⁵

Pemahaman terkait NGO merupakan sebuah tantangan karena NGO merupakan sebuah kelompok organisasi yang beragam. NGO sendiri memainkan peran dan bentuk yang berbeda-

¹⁵ David Lewis and Nazneen Kanji. 2009. *Non-Government Organization and Development*. Routledge. hal 1.

beda di setiap negara. Sebuah NGO biasanya dicirikan sebagai suatu organisasi yang sifatnya independen yang mana tidak dijalankan atau adanya campur tangan dari pemerintah serta terbentuk dari berbagai individu ataupun kelompok masyarakat dan organisasi tersebut bersifat sukarela yang mana dalam kegiatan kerjanya tidak mencari sebuah keuntungan dan memiliki struktur tersendiri di dalam organisasinya.¹⁶ Akan tetapi terdapat juga NGO yang memperoleh dana dari pemerintah tingkat tinggi dan memiliki karakteristik birokrat, sementara yang lain dapat menyerupai organisasi swasta dengan identitas perusahaan yang kuat.¹⁷ Kompleksitas dalam pemberian *labeling* pada organisasi internasional sering dianggap sesuatu hal yang sulit dikarenakan hal tersebut berpengaruh dalam peranan organisasi internasional itu sendiri dalam sebuah wilayah. Oleh sebab itu NGO tidak memiliki definisi yang dapat dijelaskan secara umum.¹⁸

Terdapat beberapa definisi dari NGO menurut para ahli, yaitu definisi NGO sendiri cenderung diartikan baik secara luas ataupun sempit. NGO dalam arti luas menurut Hukum Publik Inggris Proyek¹⁹ adalah sebuah organisasi pribadi yang berbentuk sebuah perusahaan profesional, organisasi perdagangan dan sukarela, badan amal yang memperoleh atau tidak memperoleh sebuah keuntungan. Sehingga semua NGO yang berbentuk bisnis ataupun sosial merupakan organisasi yang dapat dikatakan sebagai NGO. Charnovitz mendefinisikan NGO merupakan organisasi yang terdiri dari kelompok individu yang terorganisir karena mempunyai berbagai alasan atau kepentingan yang melibatkan aspirasi manusia.²⁰ Sedangkan Wakil mendefinisikan NGO adalah sebuah organisasi yang mempunyai pemerintahan itu sendiri dan atau

¹⁶ *Ibid*, hal 10.

¹⁷ *Ibid*, hal 2.

¹⁸ *Ibid*, hal 3.

¹⁹ Sunkin, 1993, dalam David Lewis dan Nazneen Kanji. 2009. *Non-Governmental Organizations*. Routledge. hal 10.

²⁰ Charnovitz. 1997 dalam David Lewis dan Nazneen Kanji. 2009. *Non-Governmental Organizations*. Routledge. hal 10-11.

swasta yang lebih berfokus kepada kegiatan untuk meningkatkan kualitas hidup bagi individu atau kelompok masyarakat yang membutuhkan.²¹ Akan tetapi terdapat juga organisasi yang menggabungkan karakteristik yang berbeda dan lebih dari satu sektor hal itu disebut dengan usaha sosial yang merupakan organisasi nirlaba dengan tujuan sosial.²²

David Lewis membagi NGO menjadi tiga area yaitu ekonomi, sosial dan politik dan juga berbagai katarakteristik yang mana suatu organisasi tersebut dapat dikatakan sebagai NGO.²³ Lewis sendiri lebih berfokus dalam NGO golongan ketiga yaitu tentang organisasi yang sifatnya sosial ataupun sukarela. Organisasi Non-Government yang bersifat sosial ini dianggap sangat penting karena mempunyai peranan dalam menyediakan suatu wadah atau arena bagi negara-negara untuk memfasilitasi dan memberikan sebuah dukungan dalam pembangunan dan memainkan peran untuk meningkatkan kebijakan publik dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi.²⁴

Dalam melakukan kegiatannya NGO dapat dirangkum dalam tiga rangkaian peran, yaitu sebagai *Implementer*, *catalyst*, dan *partners*.²⁵ Ketiga peran NGO tersebut dapat menjelaskan bagaimana peran NGO dalam menangani sebuah isu tertentu di suatu negara yang berfokus untuk membawa sebuah perubahan. Masing-masing peran dalam NGO tidak terbatas pada satu organisasi saja yang mana dapat terlibat dalam ketiga perankegiatan sekaligus atau dapat mengalihkan penekanannya dari satu ke yang lain, dari waktu ke waktu dan atau saat konteks dan peluang berubah.²⁶

²¹ *Ibid*, hal 11.

²² *Ibid*, hal 12.

²³ *Ibid*, hal 1.

²⁴ David Lewis. 2001. *The Management of Non-Governmental Organization*. Routledge. Hal 1.

²⁵ David Lewis dan Nazneed Kanji. 2009, *op.cit*. hal 12.;

²⁶ David Lewis. 2001, *op. cit*. hal 68.

Implementers

Peran NGO dalam implementasi berkaitan dengan memberikan atau menyediakan sumber daya berupa barang dan jasa kepada individu atau kelompok masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan yang dilakukan oleh NGO ini beragam seperti halnya memberikan atau menyediakan layanan kesehatan, keuangan mikro, penyuluhan pertanian, berupa bantuan dan hak asasi manusia. Adanya peran aktor NGO disini juga dapat menggantikan peran dari pemerintah itu sendiri.²⁷

Implementer dianggap peran yang penting karena dengan adanya peran ini NGO akan memperoleh sebuah dukungan dari masyarakat yang mana nantinya dapat mempengaruhi sebuah kebijakan pemerintah suatu negara. Selain itu juga adanya peran ini dapat memberikan sebuah pelayanan bagi negara berkembang karena kurangnya akses kebutuhan bagi mereka. Pelayanan yang telah diberikan NGO berkembang dengan cepat karena hal tersebut dapat menekan peran pemerintah yang dianggap menurun dalam menyediakan layanan secara langsung.²⁸ Sebuah NGO juga dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan untuk mengampanyekan bisnis yang bertanggung jawab secara sosial.²⁹

Implementasi untuk NGO biasanya melibatkan pengiriman barang dan jasa. Pemberian bantuan berupa layanan jasa dan barang merupakan peran yang paling menonjol karena NGO berusaha untuk menyediakan kebutuhan yang diinginkan dan dibutuhkan bahkan tidak tersedianya kebutuhan tersebut bagi mereka yang membutuhkan. Setiap NGO mempunyai program yang terstruktur untuk menyediakan dan memberikan sebuah layanan. NGO tidak hanya memberikan layanan bagi individu atau kelompok-kelompok yang membutuhkan akan tetapi

²⁷ David Lewis dan Nazneen Kanji. 2009, *loc. cit.*

²⁸ *Ibid.* hal 92.

²⁹ *Ibid.* hal 91.

NGO juga dapat memberikan layanan berupa pelatihan atau penelitian bagi NGO lainnya, pemerintah ataupun perusahaan swasta.³⁰

Catalyst

Pada peran katalisasi ini NGO berperan untuk melakukan kegiatan kampanye dan promosi terhadap isu yang menjadi perhatian mereka.³¹ Kegiatan yang dilakukan oleh NGO ini arahkan kepada individu, kelompok masyarakat lokal, NGO lainnya serta para aktor yang berhubungan terhadap pembangunan pemerintah, bisnis dan donor.³² Adanya tujuan yang dilakukan ini adalah untuk mendapatkan sebuah dukungan dalam skala yang lebih besar dan luas yang mana nantinya mampu mempengaruhi sebuah proses kebijakan.

Catalyst biasanya dipahami sebagai sesuatu yang membawa sebuah perubahan. Oleh sebab itu peran *catalyst* di dalam NGO dapat didefinisikan sebagai kemampuan NGO untuk menginspirasi, memfasilitasi atau berkontribusi pada pemikiran dan tindakan untuk mempromosikan sebuah perubahan.³³ Adanya kegiatan yang diarahkan kepada pihak individu dan kelompok masyarakat untuk pengorganisasian dalam pembentukan kelompok, kerja gender dan pemberdayaan, melobi bahkan mengadvokasi, melakukan dan menyebarluaskan penelitian, dan mencoba untuk mempengaruhi proses kebijakan yang lebih luas dengan cara inovasi dan kewaspadaan kebijakan.³⁴

Partner

Peran *partner* di dalam NGO adalah NGO melakukan kerjasama dengan pemerintah, sektor swasta, dan donor. Tujuan adanya kerjasama yang dilakukan adalah untuk memberikan masukan spesifik di dalam program atau proyek multiagen dalam skala yang lebih luas. Hal ini

³⁰ David Lewis. 2001, *op. cit.* hal 69.

³¹ *Ibid.* hal 68.

³² David Lewis dan Nazneed Kanji. 2009, *op.cit.* hal 13.

³³ *Loc.cit.*

³⁴ *Loc.cit.*

juga mencakup kegiatan yang berlangsung antara NGO dan masyarakat seperti halnya pengembangan kapasitas dan memperkuat kemampuan. Melaksanakan peran kemitraan ini merupakan tantangan yang penting bagi NGO untuk membangun dan menjalin hubungan yang mana untuk memperoleh keuntungan yang efektif, responsif, dan tidak adanya saling bergantung.³⁵ Peran *partner* ini semakin populer dikalangan pembuat kebijakan dan praktisi.³⁶

Brown dan Ashman di dalam buku David juga menjelaskan bahwa kerjasama antar pemerintah dan NGO perlu memperluas kesenjangan budaya, kekuasaan, sumber daya dan perspektif jika ingin sukses dalam menjalankan kegiatannya untuk tujuan bersama.³⁷ Kerjasama yang dilakukan juga memiliki tiga tingkat yang berlaku berlaku, yang pertama pada tingkat organisasi, yaitu organisasi dengan organisasi lainnya, yang kedua pada tingkat negara, yaitu negara dengan negara lainnya, dan yang ketiga di tingkat masyarakat itu sendiri. Adanya perkembangan kerjasama dalam semua bidang pembangunan, NGO dapat memperoleh sumberdaya pendaan baru dari pemerintah atau pendonor.³⁸ Tidak hanya itu dunia yang semakin berkembang ini maka banyaknya isu-isu yang semakin berkembang dan luas. Seperti halnya pada saat ini banyak NGO yang berfokus pada bidang hak-hak manusia dari pemerintah kepada sistem internasional.³⁹

³⁵ *Loc.cit.*

³⁶ David Lewis. 2001, *op. cit.* hal 75.

³⁷ *Loc.cit.*

³⁸ David Lewis dan Nazneed Kanji.2009, *op.cit.* hal 180

³⁹ *Ibid.* hal 33.

2.3 Operasionalisasi Konsep

2.3.1 *Non-Government Organization*

Setelah menjelaskan dan memahami konsep yang dipakai oleh penulis dalam melakukan penelitian yaitu peran ILGA dalam legalisasi *same-sex marriage* di Brazil pada tahun 2013. Selanjutnya penulis telah menjabarkan variabel dan indikator yang tergabung di dalam konsep tersebut, penjabaran ini dilakukan guna untuk memudahkan penulis melakukan operasionalisasi konsep, sebagaimana yang akan dilakukan pada pembahasan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori *non-government organization* milik David Lewis. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa NGO merupakan aktor organisasi yang berperan penting dalam bidang pembangunan atau perubahan.

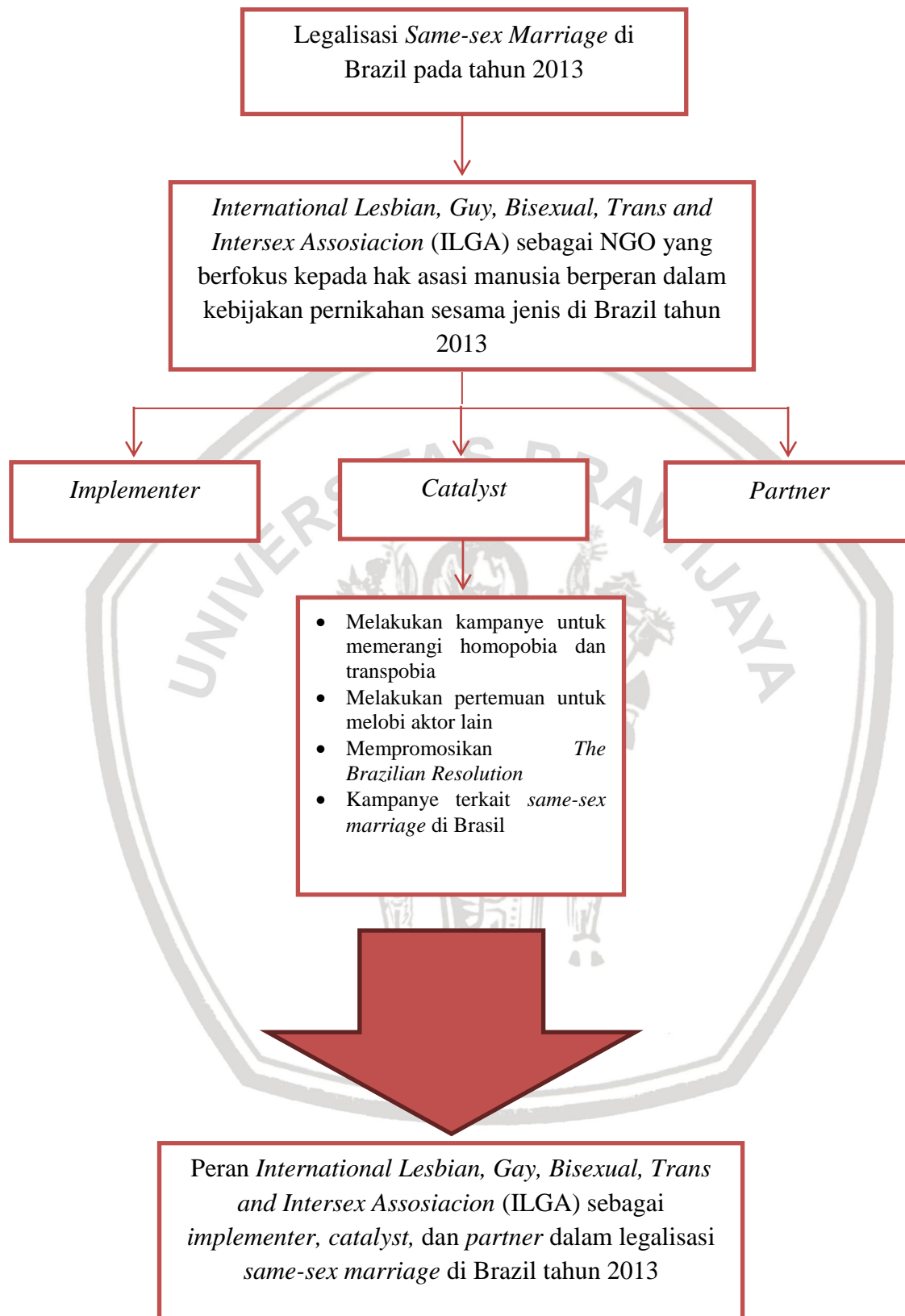
Pada operasionalisasi kasus ini peran NGO memiliki tiga variabel yaitu, *implementer*, *catalyst* dan *partner*. Akan tetapi pada penelitian ini penulis lebih berfokus pada variabel *catalyst*. Sehingga penulis akan lebih membahas ILGA diperan *catalyst* karena pada penelitian ini penulis membahas terkait peran ILGA dalam mempengaruhi masyarakat ataupun pemerinthan yang pada akhirnya memunculkan kebijakan legalisasi pernikahan sesama jenis di Brasil yang mana keputusan tersebut diikuti dengan keputusan Mahkamah Agung yang melegalkan adanya pernikahan sesama jenis tersebut pada tahun 2013.

Variabel *catalyst* ini berfokus berfokus kepada perannya untuk melakukan berbagai kegiatan kampanye, lobi dan promosi. Kegiatan yang dilakukan NGO ini diarahkan kepada individu, kelompok masyarakat lokal, NGO lainnya dan para aktor yang ikut terlibat dalam kasus yang sedang menjadi pembahasan. Dalam perannya ILGA untuk melegalisasi pernikahan sesama jenis di Brazil ILGA melakukan kampanye untuk memerangi homophobia dan transpobia karena banyaknya kasus pembunuhan yang terjadi pada kelompok LGBT di Brazil. Kampanye

ini dilakukan untuk mengurangi tindak kejahatan tersebut. selanjutnya ILGA juga melakukan kampanye terkait pernikahan sesama jenis yang mana kelompok LGBT dapat memperoleh hak status perkawinan seperti halnya masyarakat yang stabil. Tidak hanya kegiatan kampanye saja yang dilakukan oleh ILGA tetapi juga kegiatan melobi para aktor lain untuk melakukan pertemuan atau konferensi yang mana di dalamnya juga membahas terkait *brazil resolution* mengenai orientasi seksual yang nantinya juga akan bertujuan untuk memperjuangkan hak kesetaraan terhadap kaum LGBT untuk memperoleh status perkawinan yang sah.

Konsep	Variabel	Indikator	Operasionalisasi
Peran NGO (<i>Non Government Organization</i>)	<i>catalyst</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kampanye • Promosi • Lobi 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kampanye untuk memerangi homophobia dan transpobia. • Kampanye terkait <i>same-sex marriage</i> di Brazil. • Mempromosikan <i>The Brazilian Resolution</i>. • Melakukan pertemuan untuk melobi aktor lain terkait isu LGBT

2.4 Kerangka Pemikiran



2.5 Argumen Utama

Dalam peran legalisasi pernikahan sesama jenis di Brazil tahun 2013 ILGA berperan sebagai *catalyst* yaitu melakukan lobi untuk mempengaruhi sebuah pembentukan kebijakan terhadap hak asasi LGBT dan melakukan kampanye berupa Parade Gay yang bertujuan untuk menuntut kesetaraan dan memperoleh kebebasan dari tindak diskriminasi yang dilakukan para homophobia, dan untuk memperoleh hak mereka dalam memperoleh status pernikahan yang sah seperti halnya masyarakat sipil lainnya.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dalam penyusunan karya tulis ini. Metode penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan realita dari fenomena yang akan diteliti. Data yang didapat akan disusun untuk kemudian dijelaskan dan selanjutnya akan permasalahan tersebut akan menghasilkan sebuah analisa yang tersusun secara sistematis, faktual dan akurat. Dengan begitu penulis akan menjabarkan peran ILGA dalam legalisasi pernikahan sesama jenis di Brazil pada tahun 2013. Selain itu juga penulis menggunakan konsep peran NGO milik David Lewis yang terdiri dari variabel *implementer*, *catalyst*, dan *partner*. Penulis hanya berfokus pada variabel *catalyst*.

3.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah legalisasi pernikahan sesama jenis sebagai sebuah fenomena yang perlu diteliti, dengan fokus peran ILGA dalam legalisasi pernikahan sesama jenis di Brazil pada tahun 2013.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan pengumpulan data dari paper , jurnal maupun website. Data yang telah dikumpulkan penulis akan dibandingkan dengan studi pustaka karya milik peneliti lainnya yang selaras dengan fenomena yang diteliti oleh penulis. Teknik pengambilan data dan pencarian fakta yang dilakukan oleh penulis adalah studi pustaka sumber sekunder. Hal tersebut karena minimnya penlis untuk melakukan penelitian lapangan secara langsung dalam mencari data tentang peran ILGA dalam legalisasi pernikahan sesama jenis di Brazil. Oleh sebab itu penulis dituntut untuk mengmpulkan berbagai data melalui buku dan

jurnal penelitian yang berkaitan dengan rumusan masalah serta teori yang digunakan oleh penulis.

3.4 Teknis Analisis Data

Analisis data dalam kerangka kerja ini memiliki tiga inti komponen, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Setelah peneliti mengumpulkan data dan membaca hingga tuntas, kemudian dilakukan reduksi data yang bertujuan untuk mengurangi data tanpa kehilangan informasi yang signifikan. Kemudian penulis akan melakukan pengelaborasi dan penarikan sebuah kesimpulan.

3.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan skripsi, Prodi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Berikut adalah sistematika yang digunakan:

Bab I: Pendahuluan

Pada bab I ini berikan mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan sebuah fenomena yang akan diteliti oleh penulis dan menjadi akar dari pemikiran sebuah judul penulisan yang akan diteliti oleh penulis, adanya rumusan masalah yang diajukan untuk menentukan fokus yang akan diteliti oleh penulis, manfaat dari penelitian, dan tujuan dilakukannya penelitian.

Bab II: Kerangka Pemikiran

Berisikan mengenai studi terdahulu yang dijadikan bahan acuan bagi penulis untuk membandingkan atau melerevankan dengan peneliti sebelumnya. Terdapat kerangka pemikiran yang berfungsi sebagai landasan teori dalam penulisan penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis

menggunakan teori David Lewsi. Selain itu di bab II ini juga terdapat operasionalisasi konsep, dan argumen utama penulis.

Bab III: Metode Penelitian

Menjelaskan mengenai alur penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, ruang lingkup yang menjadi batas kajian penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk memperoleh data fakta mengenai fenomena yang di angkat, teknik analisa data, dan sistematika penulisan.

BAB IV: Gambaran Umum

Berisikan mengenai gambaran umum mengenai profil ILGA dan historical mengenai kaum LGBT di Brazil

Bab V: Pembahasan

Dalam bab V ini berisikan penjelasan tentang proses ILGA dalam mempengaruhi atau memberikan tekanan pada pemerintah domestic untuk melegalkan pernikahan sesama jenis di Brazil.

Bab VI: Kesimpulan dan Saran

Dalam bab VI ini penulis akan menarik sebuah kesimpulan yang telah didapatkan oleh penulis berdasarkan fakta yang telah diperoleh. Tidak lupa juga penulis akan menuliskan saran terkait dengan penelitian yang menjadi fokus bagi penulis.

BAB IV

Gambaran Umum

Kondisi LGBT di Brazil dan Sejarah Terbentuknya ILGA

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai gambaran umum *International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA)* dan juga negara Brazil itu sendiri. Penulis akan menjabarkan tentang bagaimana kondisi LGBT di Brazil, LGBT *Right* di Brazil, sejarah terbentuknya ILGA, visi dan misi, sistem parlemen Brazil dan objektif strategi ILGA 2011-2013.

4.1 Kondisi LGBT di Brazil

Brazil merupakan salah satu negara dari lima negara di Latin Amerika yang telah mengakui perserikatan sesama jenis dan satu dari tiga negara bersama dengan Argentina dan Uruguay yang telah melegalkan pernikahan jenis di negaranya. Meskipun Brazil telah memiliki beberapa Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan terhadap pasangan sesama jenis, akan tetapi banyaknya kekerasan dan diskriminalisasi terus menjadi permasalahan yang dihadapi oleh para kaum LGBT. Para kaum *transgender* lah yang paling tinggi memperoleh tindakan kekerasan dan diskriminasi di komunitas LGBT daripada kaum gay ataupun lesbian.¹

Brazil juga merupakan sebuah negara yang dikenal secara internasional mengenai masyarakatnya yang liberal dan bersikap terbuka terhadap orientasi seksual dan kebebasan untuk berekspresi. Akan tetapi jika hal tersebut menyangkut kaum minoritas seperti kaum lesbian, gay dan transeksual atau LGBT. Masyarakat Brazil dapat bertindak diskriminasi bahkan kekerasan terhadap kaum minoritas tersebut. Hal tersebut terjadi karena dianggap telah tidak sesuai dengan

¹ *Brazil Report Final*, diambil dari https://ihrp.law.utoronto.ca/utfl_file/count/media/Brazil%20Report-%20Final_0.pdf hal 1, diakses pada tanggal 10 Januari 2018.

agama dan moral.² Grupo Gay da Bahia merupakan organisasi LGBT tertua di Brazil yang didirikan pada tahun 2004 dan mengeluarkan laporan bahwa sekitar 150 orang LGBT telah terbunuh setiap tahunnya. Seorang waria merupakan target tertinggi bagi para kelompok homophobia di Brazil.³

Selama bertahun-tahun Brazil merupakan negara yang memegang rekor dunia sebagai negara pembunuh terbesar bagi kaum LGBT yang dilatarbelakangi oleh kebencian sekitar 331 korban pada tahun 2016 sehingga dapat diperkirakan orang LGBT terbunuh setiap 25 jam sekali.⁴ Disisi lain Brazil juga dikenal dunia sebagai negara yang perjuangan terhadap hak LGBT sangat besar. Brazil juga mempunyai acara tahunan yaitu parade kebanggannya yang dikenal dengan *Sao Paulo Gay Pride Parade*. Kegiatan parade tahunan tersebut mempertahankan peringkat pertamanya berdasarkan jumlah petugas yang ikut berpartisipasi di dalamnya. Parade tersebut juga merupakan perayaan terbuka dan menjadi parade terunik sehingga mampu menarik wisatawan LGBT di seluruh dunia. Selain itu pemerintah Brazil merupakan salah satu negara pertama yang ikut bekerjasama dengan organisasi hak LGBT untuk menyediakan perawatan medis gratis bagi orang-orang HIV/AIDS, dan memperoleh pengakuan internasional sebagai negara yang mampu mengurangi jumlah HIV/AIDS di bawah tingkat dari negara Amerika Serikat.⁵

Pada tingkat federal pada tahun 2004, *same-sex unions* telah dilegalkan yang pada akhirnya mengarah kepada kesetaraan pernikahan sesama jenis di tahun 2013. Di tahun 2010 hingga 2011 Mahkamah Agung memperluas hak bagi pasangan sesama jenis termasuk adopsi dan melakukan perluasan hak-hak hukum. Negara Brazil merupakan negara yang selalu aktif

² Lucas Paoli Itaborahy, *loc. cit.*

³ *Loc.cit.*

⁴ Brazil *A World LGBT Murder Capital and Rio's Place in The Data* diambil dari <http://www.rioonwatch.org/?p=37249> diakses pada tanggal 10 Januari 2018.

⁵ *Loc.cit.*

dalam memperjuangkan persamaan hak dalam badan-badan internasional seperti halnya PBB. Pemerintah kota Rio de Janeiro bekerjasama untuk menciptakan “*Rio Without Homophobia*” yang mana kampanye tersebut bertujuan untuk memerangi homophobia di kota tersebut. Program kampanye tersebut sangat populer dan sepenuhnya mendapat dukungan dari pejabat kota yang bertanggung jawab atas program tersebut.⁶

Hukum pernikahan saat ini telah sah dilakukan di Brazil dan hal tersebut memungkinkan bagi siapa saja yang ingin menikah dengan pasangan berlawanan jenis ataupun sesama jenis. Berdasarkan keputusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Federal banyak negara yang pada akhirnya mengeluarkan pedoman mengeluarkan surat nikah yang ditujukan kepada pasangan sesama jenis yang akan melakukan sebuah pernikahan. Pemerintah juga memerintahkan kepada notaris-notaris negara yang bekerja dibagian lisensi pernikahan untuk wajib memberikan layanan yang tersedia.

Namun komunitas LGBT tetap saja mendapatkan serangan sehingga menimbulkan ketakutan yang berkembang terus menerus. Seperti yang terjadi pada tahun 2017 lalu dimana Diego Vieira Machado ditemukan tewas di kampus Federal University of Rio de Janeiro. Ia adalah seorang gay berkulit hitam dan kematiannya sangat mengguncang kota tersebut. Hal tersebut memperlihatkan bahwa kaum LGBT dan orang berkulit hitam tidak aman di universitas federal tersebut. Di wilayah metropololitan Rio de Janeiro dan kota-kota pinggiran, mengalami 64 pembunuhan LGBT yang dilatar belakangi dengan kebencian antara tahun 2012 hingga 2016. Kota ini memiliki jumlah pembunuhan terbanyak dengan urutan ketiga selama periode lima tahun. Rio menduduki posisi ketiga pada tahun 2016 dibawah Sao Paulo dan Bahia.⁷

⁶ *Loc.cit.*

⁷ *Loc.cit.*

Gambar 4.1 Data pembunuhan LGBT di Brazil

Metro Area	Population	Murders	Deat
São Paulo	21,242,939	100	4.71
Rio de Janeiro	12,330,186	64	5.19
Belo Horizonte	5,873,841	44	7.49
Brasília	4,284,676	22	5.13
Porto Alegre	4,276,475	18	4.21
Fortaleza	4,019,213	33	8.21
Salvador	3,984,583	54	13.55
Recife	3,940,456	54	13.71
Curitiba	3,537,894	21	5.94
Manaus	2,568,817	81	31.53

Sumber: Brazil A World LGBT Murder Capital and Rio's Place in The Data diambil dari <http://www.rioonwatch.org/?p=37249>

LGBT Rights di Brazil

Gerakan aktivis LGBT di negara Brazil telah berjuang tidak hanya untuk memperjuangkan hak sipil saja, akan tetapi juga untuk memperjuangkan hak asasi manusia yang sifatnya mendasar, yaitu hak untuk hidup, hak untuk saling menghormati, hak martabat, dan juga dalam kesetaraan. Meskipun pada awalnya gerakan LGBT di Brazil cukup lemah akan tetapi pada saat ini gerakan LGBT di Brazil telah menjadi salah satu gerakan yang aktif di level internasional maupun nasional. Kegiatan gerakan LGBT Brazil dulunya memiliki perkembangan hak LGBT yang terlambat dikarenakan beberapa alasan, yaitu gerakan ini ditahan akibat adanya transisi yang lambat untuk menuju demokrasi yang mana hak yang dimiliki oleh masyarakat diwakili. Selain itu juga adanya pengaruh agama yang kuat menjadikan sebuah alasan bahwa homoseksual dianggap sebuah penyakit dan hal tersebut sangat meruntuhkan gerakan LGBT di Brazil.⁸

⁸ Melasipo, Julia. 2017. *The Brazilian Paradox: LGBT Legislation Improvement versus High Violence Rates Against LGBT People*. Spring 2017. University of Colorado. Hal 34.

Adanya kelemahan dalam gerakan LGBT juga disebabkan karena adanya demokrasi yang lemah, yaitu dimana masyarakat Brazil tidak tahu banyak mengenai demokrasi. Bahwa dengan adanya demokrasi masyarakat mampu memegang kendali dan keinginan dan kepentingan masyarakat sangatlah penting. Selain juga pada tahun 1988 hak kaum minoritas telah diamankan. Akan tetapi tidak untuk hak para kaum LGBT. Hingga sekitar tahun 2000 negara Brazil melakukan perbaikan terhadap hak-hak bagi sesama jenis.

Gereja Katolik pada saat itu mempunyai kekuasaan yang mendominasi untuk sebagian besar terkait sejarah dan menganggap homoseksualitas merupakan moral yang keji. Setelah itu adanya transisi dari Katolik ke Kristen; Protestan, Evangelis, Mormon, dan Saksi Yehuwa, yang mana mulai menghargai dan mengakui keberadaan komunitas LGBT. Peran agama mempunyai peran yang penting dalam perpolitikan Brazil sehingga banyaknya politisi yang juga sekaligus menjadi pemimpin agama terutama yang berasal dari kalangan orang non Katolik yang sangat menentang komunitas LGBT.⁹ Hal tersebut sangat mengancam keamanan bagi komunitas LGBT karena para pemimpin politisi dan agama dapat membatalkan dan tidak mengizinkan undang-undang terkait isu terhadap LGBT.

Pada tahun 1985 kediktatoran militer telah berakhir sehingga kelompok minoritas di Brazil mulai memperoleh haknya dan diberikan kebebasan untuk berbicara mengenai hak-hak mereka. Hal ini merupakan suatu kesempatan bagi komunitas LGBT untuk melakukan gerakannya dalam memperjuangkan pengakuan hak mereka sehingga menjadi komunitas yang dapat tumbuh kuat.¹⁰ Sejak saat itulah aktivisme di Brazil telah mempengaruhi isu-isu untuk memperjuangkan hak kaum LGBT yang dapat dilihat secara internal maupun internasional sehingga menjadi perhatian bagi masyarakat global.

⁹ *Loc.cit.*

¹⁰ *Loc.cit.*

Adanya peningkatan stabil yang dilakukan oleh komunitas LGBT untuk memperjuangkan hak mereka dengan mengandeng para advokasi yang kuat seperti organisasi sipil nasional dan adanya pengaruh dukungan internasional sehingga adanya fase gerakan LGBT di Brazil.¹¹ Pada saat Brazil masih berada dibawah kediktatoran militer pada tahun 1970 gerakan LGBT sebagian besar terdiri dari kelompok homoseksual. Joao Antonio Mascarenhas adalah seorang pengacara yang berasal dari Rio Grande do Sul dan pendiri surat kabar yang dimana seorang homoseksual dapat berbagi mengenai peristiwa yang terjadi selama kediktatoran dan berjuang untuk hak para kaum LGBT. Surat kabar milik Joao Antonio Mascarenhas hanya mempunyai masa singkat dari tahun 1978 hingga 1981 akan tetapi adanya surat kabar tersebut menjadi tonggak untuk gerakan LGBT di Brazil. Hal tersebut juga menciptakan dasar untuk melahirkannya gerakan LGBT yang lebih kuat dan aktif dalam jangka waktu kedepan. Organisasi LGBT tertua di Brazil adalah Grup Gay da Bahia yang mana grup tersebut berasal dari Bahia, Salvador.¹² Sejak munculnya Grup Gay da Bahia banyak berbagai organisasi lainnya yang berdiri untuk memperjuangkan dan membela hak dari para kaum minoritas LGBT.

Saat ini terdapat 200 NGO LGBT di seluruh negara Brazil. Grup Gay da Bahia adalah NGO yang bertahan dan paling tua di Brazil. Selain itu juga Grup Gay da Bahia merupakan NGO yang sangat berpengaruh di dunia dalam hal memperjuangkan hak kaum LGBT. Grup Gay da Bahia juga bergabung dalam organisasi ILGA untuk menangani berbagai isu LGBT. Sejak tahun 1980 Grup Gay da Bahia telah aktif membela hak asasi LGBT untuk melawan homophobia dan juga menyebarkan informasi terkait homoseksualitas serta mempromosikan tentang berbagai isu-isu LGBT. Grup Gay da Bahia telah dikenal secara internasional karena kegiatan yang

¹¹ *Ibid.* Hal 35.

¹² *Ibid.* Hal 36.

dilakukan dalam memperjuangkan hak-hak LGBT dan GGB merupakan salah satu aktivisme LGBT yang sukses di negara Brazil.¹³

Adanya dukungan jaringan transnasional yang kuat dan kombinasi advokasi domestik dapat menjadikan NGO LGBT di Brazil mampu mempengaruhi pembuatan sebuah kebijakan baru mengenai hak bagi komunitas LGBT di Brazil. Selain itu juga dapat melawan stigma-stigma sosial yang telah melekat di lingkungan masyarakat mengenai LGBT. Akan tetapi terlepas dari tercapainya hukum terkait hak LGBT, pemerintah masih terfokus pada *gay* dan transgender laki-laki yang merubah dirinya menjadi perempuan. Adanya perhatian yang diberikan pemerintah yang tidak merata dapat menimbulkan sebuah perpecahan karena adanya kelompok-kelompok kecil yang tidak dapat mewujudkan kepentingan mereka. Perpecahan ini juga menjadi terhambatnya tujuan utama bagi kaum LGBT di Brazil.¹⁴

Kemajuan Hak LGBT di Brazil

Dalam beberapa tahun terakhir, negara Brazil telah membuat kemajuan yang signifikan terkait isu kesetaraan bagi kaum LGBT. Sebagian besar adanya kemajuan yang terjadi dipimpin oleh badan eksekutif dan yudikatif, sementara badan legislatif terutama Kongres Nasional masih pasif dalam menangani isu terkait hak LGBT. Selain itu juga adanya advokasi yang berasal dari hak-hak persatuan kelompok LGBT yang menjadikan negara Brazil untuk mengakui hak LGBT yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pada awal tahun 2000 NGO nasional LGBT, yaitu *Grupo da Bahia*, dan *Associacao Brasileira de Gays, Lesbicas, Bissexuals Travesti e Transsexuals* bekerjasama dengan pemerintah Brazil untuk memajukan Brazil ke posisi utama di dalam lingkup internasional, regional, dan domestik sebagai advokasi untuk hak LGBT.¹⁵

¹³ *Loc.cit.*

¹⁴ *Ibid.* Hal 37-38.

¹⁵ *Loc.cit.*

Pada tahun 2000 juga negara Brazil telah meloloskan beberapa undang-undang terkait perihal kesetaraan hak bagi kaum LGBT. Kemudian pada tahun 2004 *same-sex union* telah dilegalkan. Setelah itu dilanjutkan pada bulan April 2010, Pengadilan Tinggi Keadilan memberhak kepada pasangan sesama jenis untuk mengadopsi anak. Pada bulan Mei 2011, Mahkamah Agung Federal menyatakan pengakuan bahwa serikat sesama jenis merupakan serikat yang stabil sebagai anggota keluarga. Selain itu juga Mahkamah Agung Federal juga memberikan hak kepada orang LGBT untuk memperoleh layanan umum seperti masyarakat normal lainnya. Di tahun yang sama Pengadilan Tinggi Keadilan melakukan proses banding dan menjunjung hak untuk pernikahan bagi komunitas sesama jenis, sehingga pada tahun 2013 merupakan pencapaian terbesar bagi LGBT untuk memperoleh hak mereka dalam melangsungkan sebuah pernikahan.¹⁶

Brazil sebagai negara homophobik dan transphobik

Brazil telah dikenal sebagai negara yang sangat buruk dan berbahaya bagi orang-orang LGBT karena banyaknya pembunuhan yang telah terjadi dan hal tersebut merupakan ancaman bagi orang-orang LGBT. Orang-orang *gay* dan transgender merupakan sasaran utama bagi para homophobia. Di Brazil orang-orang LGBT menghadapi tingkat kekerasan dan diskriminasi yang tinggi dikarenakan banyaknya hambatan untuk memperoleh dan mengakses pengadilan. Selain itu juga Brazil belum menetapkan undang-undang terkait mengenai diskriminasi terhadap orang-orang LGBT.¹⁷

Akan tetapi hal itu berbeda ketika pasangan sesama jenis telah menikah dan mengadopsi anak. Kebanyakan dari mereka yang telah menikah tidak mengalami diskriminasi dan kekerasan dari masyarakat lainnya. Hal itu terjadi karena masyarakat lebih menghormati dan memaklumi

¹⁶ *Ibid.* Hal 39.

¹⁷ *Ibid.* Hal 43.

hal tersebut. Kaum *gay* dan *lesbian* lebih diterima dikalangan sosial jika mereka telah memenuhi beberapa standar heteronormatif. Selain itu orang tua dengan sesama jenis lebih memiliki keinginan untuk diakui seperti orang tua lainnya yang memiliki seorang anak dan mengasuh anak-anak mereka.¹⁸ Beberapa pasangan sesama jenis yang telah menikah mengakui bahwa mereka menerima perhatian sosial dan hal tersebut dianggap menjadi sebuah pengampunan bagi mereka untuk mengurangi prasangka sosial yang terjadi.

4.2 Sejarah terbentuknya ILGA

Asosiasi Lesbian dan Gay Internasional, merupakan sebuah anggota organisasi yang saat ini terdiri dari 1200 anggota dari 132 negara di dunia yang terdiri dari advokat terkemuka untuk hak-hak para kaum gay, lesbian, biseksual, transgender, dan juga interseks di seluruh belahan dunia. ILGA sendiri awal mulanya memiliki nama dan dikenal dengan *International Gay Associatin (IGA)* yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1978, di Convery, Inggris. Di tahun awal terbentuknya organisasi ini keanggotaannya dibuka untuk semua kelompok LGBT, dari kelompok kecil sampai dengan organisasi nasional. Keputusan kebijakan pada organisasi ILGA ini dibuat oleh delegasi dari masing-masing kelompok di konferensi tahunan. Lingkup ILGA berkembang melampaui basis awalnya di Eropa dan Amerika Utara sehingga organisasi ini mengadopsi struktur regional semi otonom pada tahun 1997.¹⁹

ILGA melakukan banyak upaya lobi yang berfokus kepada badan-badan internasional seperti PBB, Uni Eropa, dan Organisasi untuk keamanan dan kerjasama di Eropa. Di tahun 1981, Organisasi ILGA membantu dengan mempersiapkan laporan Perlemen Eropa yang mengarah ke hal pertama untuk merekomendasikan bahwa negara-negara anggota harus mencabut undang-

¹⁸ *Prejudice and discrimination in the everyday life of same-sex marriage couple raising children, Estud. Psicol* Vol 35 no 1 Campinas Jan, Maret 2018 diambil dari http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-166X2018000100111 diakses pada tanggal 10 Oktober 2018.

¹⁹ ILGA History, diambil dari <https://ilga.org/ilga-history> diakses pada tanggal 15 Januari 2018.

undang yang diskriminatif tentang persetujuan usia, pekerjaan dan hak asuh. Pada tahun yang sama pula *co-founder* ILGA Jeffrey Dedgeon menantang hukum Northern Ireland yang mengkriminalisasi seks antara laki-laki, memenangkan kasus hak gay pertama sebelum Pengadilan Eropa Hak Asasi Manusia.²⁰

Pada awal tahun 1980an, ILGA sebagai peran penting dalam mendukung kelompok LGBT di Uni Soviet dan Eropa Timur, dimana saat itu kelompok minoritas seksual di negara-negara ini dipaksa untuk mengatur secara sembunyi-sembunyi. Dipertengahan pada tahun 1980an organisasi ini mulai memproduksi *Pink Book* yang menjelaskan gambaran global tentang hukum dan politik status orang-orang LGBT yang berevolusi menjadi *World Legal Survey*. ILGA juga berkejasama dengan Komisi Hak Asasi Manusia Gay dan Lesbian Internasional, yang didirikan pada tahun 1990 dan secara singkat dioperasikan sebagai Sekretariat Aksi ILGA, memelopori aktivisme tentang isu-isu hak asasi manusia. ILGA juga meyakinkan tentang *Amnesty International* pada tahun 1991 untuk mengadopsi sebagai “*prisoners of conscience*” individu yang dipenjara atas dasar orientasi seksual atau identitas gender. Dua tahun kemudian, hal itu membantu membujuk Organisasi Kesehatan Dunia untuk menghapus homoseksualitas dari daftar penyakitnya.²¹

Lalu pada tahun 1993 ILGA merupakan sebuah organisasi pertama yang mendapatkan status konsulatif di Dewan Ekonomi dan Sosial PBB dan bergabung dengan sekitar 3000 organisasi nonpemerintah lainnya yang mendapatkan izin untuk berpartisipasi dalam pertemuan *United Nation* tetapi *American Religious* segera menemukan bahwa organisasi ILGA termasuk beberapa kelompok yang mendukung pedofilia, *North American Man/Boy Love Association* yang menjadi anggota sejak awal 1980an. Akan tetapi NAMBLA sendiri menolak untuk

²⁰ *Loc.cit.*

²¹ *Loc.cit*

mengundurkan diri dan mengkalim bahwa hal tersebut sudah sepenuhnya sesuai dengan posisi ILGA yang mendukung penentuan nasib seksual dan sosial untuk para kaum muda, dan menentang adanya eksploitasi seksual dan penyalahgunaan. Namun Pemerintah Amerika Serikat, Kanada dan Australia menyatakan secara public bahwa mereka tidak dapat mendukung status konsultatif ILGA jika organisai-organisasi propedofil menjadi anggota ILGA itu sendiri. Status ILGA sebagai konsultatif ECOSOC pun dicabut.²²

ECOSOC sendiri menentang untuk pemulihan status konsultatif ILGA pada tahun 2002 dan 2006 hal tersebut masih berkaitan tentang permasalahan pedofilia. Organisasi ILGA sendiri telah berusaha meyakinkan bahwa organisasinya tidak sama sekali mendukung pedofilia. Pada tahun 2006, negara Amerika Serikat bergabung dengan negara lainnya seperti Kamerun, China, Kuba, Iran, Rusia, Senegal, Pakistan, Sudan dan Zimbabwe untuk melakukan pemungutan suara yang bertejuan untuk dengan mudah memecat ILGA tanpa melalui proses persidangan. Oleh sebab itu hal tersebut menggerakkan kelompok gay dan hak asasi manusia yang berjumlah sekitar 40 kelompok untuk mengirim surat dan mengajukan protes kepada Sekretaris Negara Condeleezza Rice. Setelah itu Amerika Serikat mendukung permintaan untuk status konsultatif oleh ILGA-Eropa dan sebuah organisasi LGBT Denmark nasional pada bulan Mei berikutnya, akan tetapi hasil akhirnya tetap mendapat penolakan.²³

Meskipun ILGA kehilangan status sebagai konsultatif ECOSOC tetapi ILGA tetap terus aktif melakukan lobi atas nama hak para LGBT di seluruh dunia. Salah satu yang dilakukan ILGA adalah membantu memastikan bahwa Perjanjian 1997 Amsterdam terkait diskriminasi atas dasar orientasi seksual dan telah berhasil menegaskan bahwa negara-negara baru yang ingin bergabung harus mencabut undang-undang anti gay. Pada saat ini ILGA telah menghadapi

²² *Loc.cit.*

²³ *Loc.cit.*

tantangan baru terkait dengan kebangkitan fundamentalisme agama di seluruh dunia, hal tersebut dibuktikan dengan adanya upaya bersama dari Vatikan dan Organisasi Konferensi Islam untuk mengalahkan resolusi pada orientasi seksual sebelum Komisi Hak Asasi Manusia PBB. Kelompok-kelompok lainnya juga menghadapi peningkatan represi di Eropa Timur dan Rusia, dimana ILGA akan merencanakan konferensi dunia tahun 2010. Organisasi ILGA sendiri tetap optimis dalam mewujudkan kepentingannya untuk pada hak-hak lesbian, gay, biseksual, dan transgender merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pada saat ini hanya menunggu waktu untuk dunia mengakuinya. Pada tahun 2009 ILGA mengajukan kembali untuk status konsultatif ECOSOC dan pada tahun itu pula ILGA memperoleh status konsultatif ECOSOC nya kembali.²⁴

International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA) merupakan federasi dunia dari organisasi nasional maupun lokal yang berfokus untuk tercapainya persamaan hak bagi orang-orang lesbian, gay, biseksual, trans dan intersex (LGBTI) di seluruh dunia. ILGA sendiri adalah sebuah organisasi yang didirikan pada tahun 1978, ILGA memiliki status konsultatif di Dewan Ekosos PBB. Organisasi ILGA ini berbicara dan melobi dalam forum internasional atas nama lebih dari 1.200 organisasi anggota dari 132 negara yang berbasis di enam wilayah, yaitu: Pan Afrika ILGA, ILGA Asia, ILGA Eropa, ILGALAC (Amerika Latin dan Karibia), ILGA Amerika Utara dan ILGA Oceania. ILGA merupakan sebuah organisasi yang didanai oleh pemerintah, yayasan swasta dan sumbangan dari ratusan donor swasta. Yang mana mereka mempunyai tujuan bersama untuk memberikan dukungan untuk ILGA untuk berjuang bagi mereka yang menghadapi diskriminasi atas dasar orientasi seksual mereka, identitas gender, ekspresi gender dan karakteristik seks.²⁵

²⁴ *Loc.cit.*

²⁵ About Us, diambil dari <https://ilga.org/about-us> diakses pada tanggal 15 Januari 2018.

Pada Agustus 1978, Coventry, Inggris. Perwakilan dari organisasi-organisasi dari Australia, Inggris, Denmark, Irlandia Utara, Republik Irlandia, Italia, Belanda, Skotlandia dan Amerika Serikat berkumpul bersama di sebuah pertemuan puncak konferensi tahunan kampanye untuk kesetaraan homoseksual. Banyak perubahan hukum, politik, dan sosial yang terjadi pada komunitas pelangi dalam 40 tahun terakhir yang tidak terpikirkan saat itu dan ILGA sendiri juga ada sejak pada saat itu. Oleh sebab itu ILGA mempunyai visi dan misi dalam mendirikan organisasi ini.²⁶

ILGA'S Vision²⁷

- Visi ILGA adalah sebuah dunia dimana semua hak asasi manusia dihormati dan dimana orang LGBT dapat hidup dalam kebebasan dan kesetaraan, terlepas dari orientasi seksual mereka, identitas gender dan atau ekspresi gender dan karakteristik seks.

ILGA'S Mission²⁸

- Bertindak global dan regional sebagai suara untuk hak-hak mereka yang menghadapi diskriminasi atas dasar orientasi seksual, gender identitas tau ekspresi gender.
- Untuk mempromosikan kesetaraan dan kebebasan dengan melobi, advokasi dan komunikasi, dan dengan mendidik dan memberi informasi yang relevan lembaga internasional dan regional serta pemerintah, media dan masyarakat sipil
- Untuk memfasilitasi kerjasama dan solidaritas di antara wilayah ILGA dan anggota
- Untuk memberikan kepemimpinan kepada organisasi hak asasi manusia, termasuk kami anggota dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia

²⁶ *Loc.cit.*

²⁷ ILGA. 2012. *Annual Report 2012 International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association*, hal 2.

²⁸ *Loc.cit.*

*Strategic Objectives for 2011-2013*²⁹

- Tingkatkan kapasitas ILGA: anggota, wiliyah, dewan dan staf untuk mencapai misinya dengan menyediakan kesempatan untuk jaringan, partisipasi dalam kampanye advokasi dan serta berbagi lobi praktik terbaik
- Menegaskan penerapan standard dan prinsip-prinsip hak asasi manusia tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual, identitas gender dan ekspresi gender, dan meningkatkan perhatian terhadap pelanggaran hak asasi manusia

Memajukan gerakan LGBTI global dengan mengumpulkan, menganalisis dan menyebarkan informasi yang dihasilkan oleh anggota kami

4.3 Sistem Parlemen Brazil

Brazil merupakan Negara republik federasi presidensial yang terdiri dari perserikatan, Negara bagian, distrik federal, dan kotamadya, dimana pelaksanaan kekuasaan dikaitkan dengan instrumen-instrumen yang berbeda dan independen yang mana tunduk pada sistem keseimbangan untuk menjamin kepatuhan terhadap hukum konstitusi. Bentuk Negara Brazil adalah republik karena kepala Negara dipilih oleh rakyat untuk jangka waktu yang telah ditentukan. Presidensial karena kepala Negara dipimpin oleh seorang presiden dan kepala pemerintahan, sedangkan federasi karena Negara-negara memiliki otonomi politik. Brazil memiliki sistem multipartai atau memungkinkan pembentukan hukum diberbagai pihak. Partai politik merupakan asosiasi bebas dari masyarakat yang memiliki cita-cita, minat, tujuan, dan doktrin politik yang sama dan memiliki tujuan untuk mempengaruhi dan berpartisipasi dalam kekuasaan politik. Terdapat tiga kekuatan independen ang seimbang, yaitu Legislatif yang merancang undang-undang; Eksekutif yang bertindak untuk melaksanakan program atau

²⁹ ILGA. 2012. Annual Report, *loc. cit.*

menyediakan layanan publik; dan Yudikatif yang menyelesaikan konflik antara warga Negara, entitas dan Negara.³⁰

Cabang Eksekutif Federal

Cabang Eksekutif Federal Brazil terdiri dari Presiden dan para menteri, sekretariat, dan dewan. Dimana tugas-tugas menteri adalah untuk pembentukan dan pengawasan kebijakan publik di tingkat federal. Sedangkan presiden bertugas dalam membuat undang-undang, memodifikasi struktur, dan memberhentikan kementerian, sekretariat dan juga organ administrasi publik. Kementerian merupakan tingkatan administratif tertinggi di badan eksekutif karena menteri menanggapi secara langsung kepada presiden republik dan mendukung pelaksanaan kekuasaan pada eksekutif. Menteri juga memiliki otonom teknis, finansial dan administratif yang dapat melakukan tindakan di area ataupun wilayah yang mereka tunjuk. Selain itu menteri juga mempunyai tugas untuk bertanggung jawab dalam menetapkan strategi, pedoman dan prioritas untuk penggunaan sumber daya publik serta memantau dan mengevaluasi program federal.³¹

Brazil merupakan negara pertama kali yang membuat Kementerian Kehakiman. Hal tersebut berasal dari Sekretariat Negara dalam bidang hubungan keadilan, yang diatur oleh pangeran bupati Dom Pedro pada bulan Juli 1822 yang saat ini dikenal dengan Kementerian Kehakiman dan Kewarganegaraan. Para menteri yang menjabat di cabang eksekutif Brazil dipilih oleh presiden republik. Akan tetapi kepala Kementerian Pertahanan Negara dibatasi untuk penduduk asli Brazil. Mereka yang menjawab harus berusia di atas 21 tahun dan memiliki hak

³⁰ *Federal Government State Structure*, diambil melalui <http://www.brazilgovnews.gov.br/federal-government/state-structure> diakses pada tanggal 22 April 2018.

³¹ *How The Government Works*, diambil dari <http://www.brazilgovnews.gov.br/federal-government/how-the-government-works/federal-executive-branch> diaskse pada tanggal 22 April 2018.

politik yang penuh. Para menteri juga bertanggung jawab atas koordinasi dan pengawasan organ federal serta substansi administratif sesuai bidang pertanggung jawaban mereka.³²

Selain itu pemerintah Brazil juga memiliki sekretariat khusus yang bertanggung jawab langsung kepada Presidensi Republik serta beberapa instrumen lainnya yang mempunyai status pelayanan. Sekretarian Pemerintah mempunyai tugas untuk membantu Presiden Republik dalam mengkoordinasi sosial politiknya, khususnya berkaitan dengan Kongres Nasional, partai politik, dan dalam perundingan dengan Amerika, Distrik Federal, dan Kotamadya. Tidak hanya itu, Sekretariat juga bertanggung jawab dalam bertindak sebagai pencegahan dan manajemen krisis kelembagaan serta dalam perumusan kebijakan untuk memberik dukungan terhadap usaha mikro. Sedangkan untuk Kabinet Keamanan Kelembagaan mempunyai tugas untuk bertanggung jawab dalam menganalisis dan mengawasi mengenai resiko kestabilitas kelembagaan, mengkoordinasi kegiatan intelejen federal, dan memberikan saran terkait permasalahan militer dan keamanan.³³

Dalam cabang eksekutif federal Brazil juga terdiri dari dewan, dimana dewan Brazil bertugas untuk bertanggung jawab dalam mengusulkan pedoman, mengambil sebuah keputusan terkait dengan kebijakan serta melindungi administrasi program. Dewan Brazil sendiri bergantung pada partisipasi perwakilan dari beragam segmen yang terkait dengan satu area di samping anggota dari administrasi publik. Sebagai contohnya adalah Dewan Nasional Lingkungan yang terdiri dari perwakilan dari organisasi pekerja, masyarakat sipil, organisasi pengusaha serta mereka yang berasal dari pemerintahan federal, negara bagian, dan kota.³⁴

³² *Loc.cit.*

³³ *Loc.cit.*

³⁴ *Loc.cit.*

Cabang Legislatif Federal

Cabang Legislatif Federal di Negara Brazil terdiri dari kamar deputy dan senate yang masing-masing mewakili rakyat Brazil, Amerika Serikat dan Distrik Federal. Kedua rumah tersebut membentuk Kongres Nasional yang terletak di Brasilia, dimana para senator dan deputy federal bekerja. Pengadilan Federal Auditor juga merupakan bagian dari legislatif dan mempunyai tanggung jawab dalam mengontrol dan memantau administrasi publik. Senat mewakili unit federal dan setiap Negara bagian dan Distrik Federal memilih tiga senator yang mana terlepas dari luas wilayah atau jumlahnya penduduk. Senat tersebut dipilih dari 81 anggota yang nantinya akan menjabat selama delapan tahun. Fungsi utama senator adalah mengusulkan, memperdebatkan dan menyetujui hukum yang sesuai dengan kepentingan negaranya.³⁵

Kamar Deputy bertugas membahas persetujuan hukum tentang berbagai tema serta pemantauan penggunaan sumber daya yang dikumpulkan dari masyarakat. Adanya pembagian kursi yang dilakukan sebanding dengan jumlah penduduk di Amerika dan Distrik Federal, dengan jumlah minimum delapan dan jumlah maksimum 70 deputy untuk setiap Federasi. Sehingga total tidak yang diperoleh tidak boleh lebih dari 513. Kongres Nasional memverifikasi bahwa sumber daya publik digunakan sesuai dengan hukum. Mereka juga meminta bantuan dari TCU untuk membantu mengklarifikasi permintaan dari siapa saja yang mengelola pendapatan, aset, atau barang publik. Kekuasaan legislatif di yurisdiksi Negara bagian dan kota merupakan tanggung jawab dari Majelis Legislatif dan Majelis Dewan sehingga hal ini diwakili oleh deputy Negara yang bertanggung jawab untuk membuat dan menyetujui undang-undang Negara dan memantau eksekutif.³⁶

³⁵ *Loc.cit.*

³⁶ *Ibid.*

Dibawah ini merupakan istilah dan fungsi dari beberapa beberapa anggota di cabang legislatif Negara Brazil:

1. Dewan Pejabat bertugas bertanggung jawab dalam mengelola pekerjaan legislatif dan layanan administrasi untuk Kamar Deputi
2. *Plenary* merupakan organ tertinggi untuk sebagian besar keputusan Dewan Perwakilan Rakyat atau dengan kata lain forum terakhir untuk sebagian besar pembahasan
3. *Commissions* merupakan instrumen bantu kolektif dari proses legislatif. *Commissions* bertugas untuk menilai materi yang dibicarakan selama perdebatan di *Legislative Power*
4. *Permanent Commissions*, tidak boleh memiliki kurang dari 17 deputi atau lebih dari 61 deputi. Tidak ada wakil yang dapat memiliki kursi di lebih dari satu komisi permanen dengan pengecualian Komisi Keamanan Publik dan Perundang-undangan Partisipatif
5. *Parliamentary Commission of Inquiry*, bertugas dalam menyelidiki fakta yang telah ditentukan yang memiliki kepentingan utama bagi kehidupan publik dan tatanan hukum, ekonomi dan sosial Negara tersebut
6. *External Commissions*, mempunyai fungsi Perlemen di luar Dewan Deputi
7. *Proposal for a Constitutional Amendment*, bertugas untuk mengusulkan perubahan dalam teks asli Konstitusi Federal
8. *Ordinary Law Project*, merupakan hukum umum yang harus disetujui oleh Presiden Republik untuk menjadi sebuah hukum
9. *Provisional Measures*, merupakan norma sementara yang memiliki kekuatan hukum yang dikeluarkan oleh Presiden Republik dan hanya menjadi hukum ketika mereka disetujui oleh Kongres Nasional

10. *Legislative Decree Project and Draft Resolution*, mempunyai tugas yang berurusan dengan hal-hal yang berkaitan dengan yurisdiksi Kongres Nasional atau Rumah mereka dan tidak dikenakan sanksi atau veto presiden
11. *Delegated Laws* merupakan hukum yang dikeluarkan oleh Presiden Republik dengan izin tegas dari kekuasaan legislatif

Cabang Yudisial Federal

Negara Brazil memiliki cabang yudisial federal dimana cabang tersebut terdiri dari kehakiman federal. Kehakiman Federal Brazil mempunyai tugas dan fungsi sebagai suatu instrumen yang menjamin hak individu, entitas, dan negara. Otonomi keuangan dan administrasi dijamin oleh Konstitusi Federal itu sendiri. Organ-organ dari Kekuasaan Kehakiman itu sendiri terdiri dari Mahkamah Agung Federal, Pengadilan Tinggi Keadilan, Pengadilan Regional Federal, Pengadilan Perburuhan Federal, Pengadilan dan hakim, Pengadilan Pemiludan dan Hakim, Pengadilan Militer dan Hakim, Negara, Distrik Federal, dan Pengadilan dan Hakim Wilayah.

Mahkamah Agung merupakan suatu instrumen yang memiliki kedudukan pengadilan tertinggi di dalam sistem peradilan Brazil. Fungsi utama dari Mahkamah Agung adalah untuk memastikan bahwa konstitusi diikuti dan memberikan keputusan akhir dalam permasalahan konstitusional. Hal itu terdiri dari 11 menteri hakim yang dipilih oleh presiden republik dan diberi nama oleh presiden setelah memperoleh persetujuan dari senat federal. Mahkamah Agung Federal memiliki kursi di Federal Capital, Brazilia, serta memiliki yurisdiksi atas seluruh wilayah nasional.³⁷ Kekuasaan Kehakiman disusun oleh Dewan Kehakiman Nasional, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Regional Federal dan Hakim Federal, Pengadilan Perburuhan, Pengadilan dan Jaksa

³⁷ *Loc.cit.*

Buruh Daerah, Pengadilan Militer dan Hakim, Pengadilan Militer, Pengadilan dan Hakim Negara Bagian, Distrik Federal, dan Wilayah.

Pada Konstitusi 1988, pasal 102 menyatakan bahwa Mahkamah Agung Federal berfungsi untuk melindungi Konstitusi. Selain itu Mahkamah Agung juga berfungsi dalam menilai langsung tidakan inkonstitusionalitas, tidakan deklaratif konstitusionalitas, tuduhan ketidaktaatan ajaran fundamental dari konstitusi itu sendiri serta ekstradisi yang diminta oleh negara asing. Mahkamah Agung juga mengatur dan menjatuhkan hukuman untuk pelanggaran pidana umum terhadap Presiden Republik, Wakil Presiden, anggota Kongres Nasional, Hakim Agung dan Jaksa Agung Republik.³⁸ Mahkamah Agung sendiri memiliki organ di bawahnya yaitu Dewan Kehakiman Nasional. Dewan Kehakiman Nasional merupakan organ dibentuk melalui Amandemen Konstitusi 45 pada tanggal 8 Desember 2004. Anggota dari Dewan Kehakiman Nasional terdiri dari anggota yang dipilih oleh Pengadilan atau Penuntut Umum. Anggota Dewan disebut dengan Conselheiros. Peran dari Dewan Kehakiman Nasional adalah bertanggung jawab dalam menjaga dan memastikan bahwa sistem peradilan tetap otonom, menyusun dan menerbitkan statistik terkait sistem pengadilan serta memantau disiplin terhadap anggota kehakiman Brazil. Ketua Dewan Kehakiman Nasional merupakan Ketua dari Mahkamah Agung itu sendiri.³⁹

4.4 Politicians Brazil take a step to recognizing same sex marriage

Para politisi di Brazil telah membuat langkah kecil mengenai keputusan untuk melegalkan pernikahan sesama jenis. Politisi Brazil telah mengajukan proposal mengenai isu ini jauh sebelum Kongres Brazil selama 16 tahun lalu. Akan tetapi komite hak asasi manusia di

³⁸ Current Structure of Supreme Court diambil dari

http://www2.stf.jus.br/portalStfInternacional/cms/verConteudo.php?sigla=portalStfSobreCorte_en_us&idConteudo=120283 diakses pada tanggal 10 Oktober 2018.

³⁹ Government Judiciary Branch diambil dari <http://www.v-brazil.com/government/judiciary-branch/national-council-of-justice.html>

Senat Brazil baru menyetujui adanya perubahan hukum perserikatan sesama jenis ini pada tanggal 24 Mei 2011. Adanya keputusan tersebut juga masih harus melalui proses dimana RUU tersebut harus memperoleh persetujuan dan perizinan dari komite senat lainnya sebelum memperoleh suara penuh dan menjadi sebuah undang-undang. Hukum kohabitasi Brazil mengakui untuk memberikan hak yang sama bagi mereka pasangan sesama jenis untuk menikah, mengadopsi bahkan tunjangan untuk memperoleh pensiun, pajak, warisan, dan pelayanan umum lainnya.⁴⁰

Pada tahun 2011 Mahkamah Agung Brazil memutuskan bahwa pasangan sesama jenis di Brazil berhak atas hak serikat mereka secara hukum. Setelah diputuskannya mengenai legalisasi pernikahan sesama jenis pasangan *gay* ataupun *lesbian* dapat mengubah status serikat sipil mereka menjadi menikah atas dasar persetuan hakim negara. Berhubungan dengan persetujuan atas pernikahan sesama jenis masih adanya perdebatan mengenai RUU baru. Senator Marta Suplicy berpendapat bahwa politisi perlu membuat sebuah undang-undang terkait pernikahan tersebut sesuai dengan perizinan yang telah disahkan oleh pengadilan. Luiz Mott Phd selaku dari pendiri kelompok LGBT tertua di Amerika Latin yaitu *Grupo Gay de Bahia*, menyambut baik adanya keputusan tersebut akan tetapi tidak berharap banyak dengan keputusan-keputusan politisi terharap RUU tersebut.⁴¹ Legalnya pernikahan sesama jenis yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung berlaku di seluruh negara Brazil. Negara bagian yang telah ikut melegalkan adalah Alagoas, Bahia, Ceara, Espirita Santa, Distrik Federal, Mata Grosso do Sul, Paraiba, Piaui, Rondonia, Santa Catarina, Sao Paulo dan Sergipe, serta kota Santa Rita do Sopocai. Di Rio de Janerio sendiri pasangan sesama jenis dapat melakukan pernikahan akan tetapi jika hakim lokal menyetujuinya.

⁴⁰ *Brazil Takes First Steps Legalizing Gay Marriage*, 2012, diakses dari <https://www.gaystarnews.com/article/brazil-takes-first-steps-legalizing-gay-marriage250512/#gs.fBilOsk>

⁴¹ *Loc.cit.*

Hal tersebut sangatlah tidak mudah bagi kelompok LGBT di Brazil untuk memperoleh legalisasi sepenuhnya terkait pernikahan sesama jenis. Adanya keputusan yang telah ditentukan merupakan kabar yang sangat baik bagi mereka sehingga yang menjadi tujuan utama adalah pentingnya perolehan legalitas tersebut. Kelompok LGBT tidak mampu berharap lebih terkait resolusi undang-undang karena mengingat masih banyaknya anggota kongres maupun senator yang evangelis dari cabang Pantekosta yang masih menolak terkait hukum yang menjamin hak bagi kaum homoseksual.

Adanya keputusan terkait legalisasi pernikahan sesama jenis ini telah menimbulkan paradoks. Meskipun telah melalui berbagai proses selama 20 tahun terakhir untuk meloloskan undang-undang federal mengenai perlindungan terhadap hak bagi para orang LGBT akan tetapi proses ini melemah dan mengalami berbagai hambatan. Hingga pada akhirnya hanya keputusan Mahkamah Agung yang mampu untuk mengatasi hal tersebut. Meskipun timbul banyak perdebatan paradoks akan tetapi sebagian orang memberikan pujian terhadap aktivis LGBT dalam upayanya untuk memperoleh dukungan dari negara dan hukum. Adapun masyarakat lain juga berpendapat terkait penolak sosial dan politik karena dipengaruhi oleh kekuatan hak agama dan kegagalan pada organisasi LGBT dalam menciptakan gerakan massa.⁴² Tidak hanya itu gerakan LGBT yang ada di Brazil dianggap sebagai gerakan yang terlalu bergantung kepada negara untuk mempromosikan dan mendukung ideologi keberagaman dengan menggunakan spanduk pelangi, menunjukkan bahwa Brazil merupakan negara yang demokrasi multikultural akan tetapi Negara Brazil sendiri gagal dalam menjamin perlindungan terhadap orang LGBT dan persamaan hak.

Adanya legalisasi pernikahan sesama jenis disetujui dengan adanya penerbitan Resolusi 175. Di dalam resolusi tersebut ditetapkan bahwa pasangan sesama jenis berhak atas pernikahan

⁴² *Op. Cit.* Suenna Caulfield

sipil mereka.⁴³ Dalam proses legalisasi pernikahan sesama jenis yang diikuti oleh keputusan dari Mahkamah Agung Brazil dilakukannya sebuah sidang pleno yang dilaksanakan pada tanggal 4 dan 5 Mei 2011. Dalam sidang pleno sesi pertama Hakim Ayres Britto sebagai pelopor berpendapat bahwa Pasal 3. IV Konstitusi melarang adanya diskriminasi terhadap hal apapun itu berdasarkan seks, ras, dan warna kulit. Itu artinya tidak boleh adanya tindak diskriminasi terkait dengan preferensi seksual. Adanya Pasal tersebut Hakim Ayres Britto berpendapat bahwa pasal tersebut tidak sesuai atau bertabrakan dengan artikel 1723 dari KUH Perdata Brasil yang mengatakan bahwa tidak adanya pengakuan pernikahan sesama jenis sebagai sebuah keluarga.⁴⁴

Direct Unconstitutionality Action 477 pada awalnya diajukan ke pengadilan sebagai *The Allegation of Disobedience of Fundamental Precept 178*. Adanya gugatan tersebut bertujuan untuk mengumumkan pengakuan terkait serikat sesama jenis merupakan sebuah entitas keluarga. Hakim Ayres Britto meminta agar serikat sesama jenis memperoleh hak dan tugas yang sama seperti halnya serikat stabil. Pada *The Allegation of Disobedience of Fundamental Precept 132*, pemerintah negara bagian Rio de Janeiro berpendapat bahwa tidak adanya pengakuan terhadap serikat sesama jenis yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar seperti halnya seketaraan, kebebasan dan sebuah prinsip martabat manusia.⁴⁵ Oleh sebab itu, adanya argumen yang dikeluarkan oleh Hakim Ayres Britto, Mahkamah Agung Brasil menerapkan sebuah rezim hukum perserikatan sipil yang berdasarkan Pasal 1723 KUH Perdata berlaku bagi perserikatan sesama jenis di Brasil.

⁴³ 5 Anos da Regulamentacao do Casamento diambil dari <https://mdemulher.abril.com.br/estilo-de-vida/5-anos-da-regulamentacao-do-casamento-homoafetivo-no-brasil-o-que-mudou/> diakses pada tanggal 17 Desember 2018.

⁴⁴ Portal STF International diambil dari http://www2.stf.jus.br/portalStfInternacional/cms/destaquesClipping.php?sigla=portalStfDestaque_en_us&idConteudo=179046 diakses pada tanggal 17 Desember 2018.

⁴⁵ *Loc.cit.*

Tidak hanya itu sidang pleno yang diadakan juga dihadiri oleh ILGA sebagai organisasi LGBT yang mewakili organisasi LGBT di Brazil untuk ikut berpartisipasi dan mengeluarkan aspirasi mengenai kesetaraan hak bagi kaum LGBT. Dalam prosesnya ILGA menyampaikan pendapat terkait pernikahan sesama jenis dan hak yang adil bagi kaum LGBT seperti halnya masyarakat Brazil lainnya, dan juga anti terhadap tindak diskriminasi yang dilakukan oleh para homopobia.⁴⁶

Dengan adanya sidang pleno tersebut banyak politisi berpendapat bahwa adanya konsekuensi dari pembentukan konstitusi adalah semua manusia setara di hadapan hukum termasuk dengan pasangan sesama jenis. Selain itu juga Hakim Marco Aurelio menegaskan bahwa konsep keluarga telah mengalami perkembangan. Ia juga berpendapat bahwa di dalam Konstitusi Federal tidak adanya penerapan dalam pelarangan pasangan sesama jenis untuk menikah. Oleh sebab itu serikat sesama jenis juga berhak memperoleh kesetaraannya seperti hak para serikat stabil.⁴⁷ Dengan begitu berarti serika heteroseksual dan homoseksual adalah sebuah entitas keluarga. Banyaknya Hakim Brasil yang mengajukan terkait kesetaraan hak bagi sesama jenis maka Mahkamah Agung Brasil memutuskan untuk memberikan hak yang setara bagi pasangan sesama jenis untuk memperbolehkan mereka untuk mendaftarkan pernikahannya dan seorang notaris tidak memperbolehkan untuk menolak hal tersebut.

⁴⁶ *Loc.cit.*

⁴⁷ *Loc.cit*

BAB V

Peran ILGA dalam Legalisasi *Same-sex Marriage* di Brazil

Di dalam bab V ini penulis akan membahas dan menjelaskan mengenai apa saja yang dilakukan oleh ILGA dalam legalisasi pernikahan sesama jenis di Brazil pada tahun 2013. Fakta yang disuguhkan sebagai peran ILGA yang memungkinkan peneliti untuk melakukan pembuktian kebenaran dari argumen utama yang telah dibuat.

5.1 Legalisasi *same-sex marriage* di Brazil

Brazil merupakan negara yang telah melegalkan pernikahan sesama jenis pada tahun 2013. Adanya keputusan pernikahan sesama jenis tersebut disahkan oleh Mahkamah Agung Brazil. Setelah keputusan yang diambil oleh Mahkamah Agung, Dewan Keadilan Nasional menerbitkan resolusi 175. Resolusi 175 sendiri di dalamnya menjelaskan bahwa telah ditetapkan bahwa pasangan sesama jenis berhak atas perkawinan sipil dan seorang notaris dan hakim tidak berhak untuk menolak permintaan mereka. Diterbitkannya resolusi tersebut melalui proses pertimbangan yang dilakukan di dalam sidang pleno. Hasil dari pertimbangan tersebut adalah pasal 1 Otoritas yang tidak diizinkan untuk menolak otorisasi, untuk memasukkan perkawinan sipil atau mengubah serikat stabil menjadi perkawinan sesama jenis, pasal 2 penolakan yang diatur dalam pasal 1 akan menyiratkan komunikasi langsung dengan hakim terkait untuk langkah-langkah yang sesuai, dan pasal 3 resolusi ini mulai berlaku pada tanggal publikasi.¹

5.2 Peran ILGA

5.2.1 ILGA Meluncurkan Kampanye Untuk Memerangi *Homophobia* dan *Transphobia*

ILGA dalam kegiatannya melakukan sebuah kampanye yang dilakukan di Sao Paulo. Kampanye tersebut bertujuan untuk memerangi para homophobia dan transphobia. Selain itu juga untuk meningkatkan rasa hormat kepada sesama dan juga mengurangi adanya tindakan

¹ *Op.cit.*, 5 Anos da Regulamentacao do Casamento.

diskriminasi terhadap orang-orang LGBT. Tahap pertama dalam melakukan kampanye ini adalah bertujuan untuk memerangi diskriminasi dan prasangka terhadap orang-orang *transgender*, serta penyebaran hukum terkait hukuman bagi para pelaku homophobia dan diskriminasi di Negara Bagian Brasil. Terdapat 58 stasiun yang dipenuhi dengan poster-poster yang bergambar jelas terkait wanita *transgender*.²

Selain itu ILGA juga mengadakan kampanye pada tahun 2018 dimana pada saat itu merupakan hari internasional melawan *homophobia*, *transphobia* dan *biphobia*. Adanya homophobia di kehidupan orang-orang LGBT merupakan sebuah ancaman bagi kehidupan mereka. Dikarenakan tindak diskriminasi yang sering mereka dapatkan menjadikan ketidakadilan dan kebebasan di dalam kehidupan orang-orang LGBT. Mulai tanggal 17 Mei kampanye ini akan berjalan selama seminggu penuh. Adanya kampanye yang diadakan oleh ILGA memberikan suara kepada para LGBT dan para pembela hak asasi manusia dari seluruh dunia. Mereka akan membagi kisah mereka dengan masyarakat dunia tentang bagaimana LGBT-phobia berdampak pada kehidupan mereka dan akan memberikan dukungan terhadap komunitas pelangi.³

5.2.2 ILGA melakukan konferensi di Brasil untuk membahas terkait memperjuangkan kesetaraan orang LGBT

ILGA merupakan suatu organisasi yang bertujuan untuk menjadi suara jaringan global, komunitas, dan gerakan LGBT yang berkomitmen untuk membentuk suatu dunia dimana di dalamnya setiap individu ataupun kelompok dapat memperoleh sebuah kebebasan, rasa aman, dan juga hak kesetaraan. ILGA mempunyai empat misi, yaitu: *act*, *work*, *empower*, dan *promote*. *Act*, organisasi ILGA bertindak sebagai suara global untuk hak-hak bagi mereka yang

² Brazil Sao Paulo Metro Launches a Campaign to Combat Homophobia and Transphobia, diambil dari <https://www.ilga.org/brazil-s-o-paulo-metro-launches-a-campaign-to-combat-homophobia-and-transphobia> diakses pada tanggal 17 Desember 2018

³ Turn It Off, diambil melalui <https://www.ilga.org/turnitoff> diakses pada tanggal 17 Desember 2018.

memperoleh tindakan diskriminasi atas dasar orientasi seksual, identitas gender dan ekspresi *gender*; *work*, ILGA bekerja dengan tujuan tercapainya kebebasan, kesetaraan, dan keadilan bagi para kaum LGBT yang mana hal tersebut dilakukan melalui advokasi, bertindak kolaboratif, mendidik dan memberikan informasi terhadap lembaga, pemerintah, media, dan masyarakat sipil; *empower*, ILGA melakukan permbedayaan terhadap anggotanya dan organisasi hak asasi manusia lainnya dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia, dan memfasilitasi kerjasama antar daerah dan anggota ILGA; *promote*, ILGA juga melakukan promosi terhadap keragaman dan kekuatan dari pada kaum LGBTI di seluruh dunia.⁴

International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA) telah mengadakan agenda konferensi dunia setiap tahunnya. Konferensi yang diselenggarakan oleh ILGA merupakan wadah dimana aktivitas suatu organisasi tersebut dibentuk. Selain itu juga adanya konferensi tahunan ini juga dapat menjadi ajang berkumpul bagi para aktivis LGBT di seluruh dunia dan melakukan diskusi bersama terkait gerakan mereka di masa yang akan datang nantinya. Di dalam konferensi ini organisasi anggota ILGA memilih wakil mereka, mendukung anggota baru dan juga mengajukan beberapa proposal untuk perubahan konstitusional. Adanya ILGA konferensi dunia telah berhasil mengumpulkan 450 aktivis dari 103 negara.

Konferensi merupakan saat yang tepat untuk dilakukannya sebuah diskusi dan membahas terkait gerakan LGBT internasional. Dalam topik pembahasan yang dilakukan konferensi tersebut adalah mencangkup isu terhadap perempuan, HIV/AIDS, kekerasan dan diskriminasi LGBT. Pada tahun 2011 ILGA mengadakan sebuah konferensi yang berlangsung di Brazil dan konferensi ini diselenggarakan oleh Presiden Dilma Rosseff. Seperti halnya konferensi nasional lainnya, konferensi ini diselenggarakan berujuan untuk memantau dan mendefinisikan kebijakan publik negara Brazil. Konferensi ini akan didahului dengan konferensi tingkat kota dan negara-

⁴ ILGA, What We Do <https://ilga.org/what-we-do>

negara bagian yang telah ikut berkontribusi terkait dengan perumusan kebijakan. Selain itu juga terdapat negara bagian dan federal yang juga berkontribusi untuk mengambil bagian di dalam konferensi nasional tersebut.⁵ Konferensi yang diselenggarakan pun sifatnya terbuka bagi pengamat internasional yang juga bertujuan agar jaringan internasional mempromosikan hak para LGBT.

Selain itu pada tahun 2010 ILGA juga mengadakan konferensi di Brazil yang mana konferensi tersebut dihadiri oleh 430 aktivis dan para pemerhati LGBT yang bekerja pada bidang gender dan seksualitas. Tujuan dari konferensi yang diselenggarakan ILGA adalah untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam menentang homophobia. Homoseksual sendiri masih mengalami perlakuan tidak adil atau diskriminasi di 11 dari 33 negara di wilayah Amerika Latin. Secara keseluruhan 37 negara menghadiri konferensi tersebut dan 30 negara lainnya berasal dari Amerika Latin dan Karibia, serta Belgia, Pakistan, Perancis, Amerika Serikat, Spanyol, dan Kanada.⁶

Pada pembukaan konferensi ILGA ini pertama membahas terkait diskriminasi homoseksualitas yang masih banyak terjadi di lebih 60 negara. Pada waktu yang bersamaan PBB dan OAS juga membahas dan merumuskan hak-hak seksual merupakan hak asasi manusia. Dalam konferensi tersebut juga dijelaskan bahwa selama 13 tahun ILGA telah berdiri banyak sekali mengalami berbagai kemajuan terkait legislasi dan adanya pengakuan hak bagi LGBT, seperti halnya persetujuan Deklarasi Hak Asasi Manusia, Identitas Gender dan Orientasi Seksual yang telah ditandatangani oleh 66 negara oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2008. Adanya program ILGA di Amerika Latin dan Karibia menunjukkan bahwa terdapat tantangan penting

⁵ Brazil To Hold Second Nation, 2011, diakses dari <https://www.ilga.org/brazil-to-hold-its-second-nation-lgbt-conference> diambil pada tanggal 10 Oktober 2018.

⁶ Jandira Queiroz, 2010, 5th ILGA-LAC Conference Brings Together More Than 400 LGBTI Activist in Curitiba, Brazil, diakses melalui <https://sxpolitics.org/around-the-world-61/3906> diambil pada tanggal 20 Oktober 2018.

dalam perjalanan dan proses untuk adanya pengakuan dan perlindungan hak kewarganegaraan bagi para LGBT dan eksistensi kaum LGBT bagi subyek politik.⁷

Konferensi ILGA ini dianggap sangat penting untuk mempersatukan kelompok mereka tidak hanya dilingkup nasional saja akan tetapi lingkup global juga dan mempengaruhi dan memajukan sebuah kebijakan. Konferensi ILGA ke-5 ini dianggap berbeda dengan konferensi yang diselenggarakan sebelumnya karena kehadiran anggota dan partisipasi yang lebih banyak dihadiri oleh lesbian, trans dan orang muda. Toni Reis selaku koordinator acara pra konferensi beranggapan bahwa pentingnya mengadakan pra konferen untuk mengangkat hal-hal penting dengan tujuan nantinya proposal tersebut akan dibahas di konferensi utama. Koferensi ILGA ini juga memperoleh banyak dukungan dari tingkat internasional untuk partisipasi orang trans. Menurut Gloria Careaga adanya penyenggaraan pra konferensi yang telah berlangsung selama dua hari sebelum diselenggarakannya konferensi utama membantu membawa pembahasan di konferensi utama dan lebih memahami pendekatan yang lebih luas terkait pemahaman tentang “menjadi LGBT”.⁸ Konferensi ini tidak hanya fokus dengan penegasan seksual akan tetapi kritik terhadap kondisi LGBT.

5.2.3 ILGA melakukan kampanye untuk memperoleh dukungan terkait *The Brazilian Resolution*

International Lesbian and Gay Association (ILGA) merupakan jaringan aktivis internasional yang telah ada sejak 1978. Organisasi ini telah aktif terlibat dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa selama beberapa tahun ini, pidato pertama yang membahas homoseksualitas dalam forum PBB dibuat pada bulan Agustus 1992.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Loc.cit.*

Pada bulan November tahun 2003 ILGA mengadakan konferen di Manila. Selama konferensi dunia tersebut para anggota ILGA memutuskan untuk memberikan dukungan terhadap Brazil mengenai resolusi orientasi seksual. Konferensi dunia ILGA memilih gagasan "identitas gender" untuk dimasukkan dalam versi final dari resolusi yang akan diusulkan oleh Brazil di UNCHR Maret mendatang. Claudia Roth, Anggota Parlemen dan Komisaris Pemerintah Federal untuk Kebijakan Hak Asasi Manusia dan Bantuan Kemanusiaan di Kantor Luar Negeri, Jerman hadir di Manilla, bertemu dengan aktivis LGBT dan memberikan pidato terakhir Konferensi.⁹

Sebuah pertemuan strategi diselenggarakan oleh ARC International dan ACPD di Rio de Janeiro pada Desember 2003. Organisasi LGBT internasional seperti IGHLRC dan ILGA bertemu dengan organisasi LGBT nasional dari belahan bumi Selatan dan organisasi hak asasi manusia internasional (*ACPD, Human Rights Watch, Amnesty International*). Kampanye umum untuk mendukung resolusi Brasil muncul. Koalisi bekerja dengan baik menjelang sesi UNCHR untuk melobi negara-negara yang duduk di Jenewa. Pada 2004, koalisi yang lebih kuat dan lebih besar bertemu lagi di Jenewa pada awal Desember. Setelah pertemuan strategi NGO Rio, Sekretaris Jendral ILGA Kursad Kahramanoglu menghabiskan seminggu di Argentina untuk mengatur lobi bersama dengan aktivis lokal dan bertemu dengan politisi Argentina terkemuka. Dengan anggota ILGA lokal CHA (*Comunidad Homosexual Argentina*), ia bertemu dengan Dr. Rodolfo Mattarollo, Kepala Kabinet untuk Sekretaris Hak Asasi Manusia untuk Menteri Kehakiman, Keamanan dan Hak Asasi Manusia Nasional dan kemudian dengan Dr. Rafael A. Bielsa, Menteri Luar Negeri. Keduanya meyakinkan pemerintah Argentina akan mendukung resolusi.¹⁰

⁹ *ILGA Supporting The Brazilian Resolution*, diambil dari <https://ilga.org/ilga-supporting-the-brazilian-resolution>

¹⁰ *Ibid.*

Sebuah situs web didirikan untuk berkomunikasi secara khusus pada resolusi brazilian dan pada posisi ILGA mengenai masuknya identitas gender. Tersedia dalam 7 bahasa, itu dipublikasikan secara luas dengan kampanye informasi terhadap semua 400 anggota ILGA untuk menyampaikan berita di negara mereka, khusus (media LGBT, termasuk situs web) dan media arus utama. Versi baru dari situs ini akan meluncurkan kembali petisi dan mencoba untuk menarik lebih banyak perhatian pada resolusi. Situs aksi tersebut juga memanggil orang dan organisasi untuk menandatangani petisi yang mendukung resolusi Brasil atau teks apa pun yang secara khusus menyebutkan orientasi seksual dan identitas gender sebagai hak asasi manusia di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekitar 35 000 menjawab panggilan pertama untuk petisi dalam periode tiga bulan. 2/3 dari mereka meninggalkan alamat email. Panggilan kedua untuk petisi meminta yang terakhir untuk memanggil teman-teman mereka untuk menandatangani petisi dan menghasilkan 10.000 tanda tangan yang mengadung untuk petisi. Petisi itu juga memberi kesempatan resmi untuk bertemu dengan Ketua Komisi, Duta Besar Australia Mike Smith pada awal sesi UNCHR untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang situasi mengenai resolusi Brasil. Saat itu diputuskan untuk meninggalkan petisi terbuka sampai tahun berikutnya.¹¹

ILGA mengorganisir sebuah tim aktivis untuk datang ke Jenewa untuk menghadiri sesi ke-60 UNCHR. Berkat bantuan dari Kementerian Luar Negeri Jerman dengan kerja bagus, selusin aktivis dari negara-negara yang berbeda seperti Kepulauan Fiji, Sri Lanka, Cina atau Brazil dapat langsung berhubungan dengan delegasi nasional mereka di PBB. Tim ILGA adalah bagian dari kehadiran LGBT yang lebih luas, yang menghasilkan kelompok LGBT terbesar yang

¹¹ *Loc.cit.*

pernah hadir pada pertemuan UNCHR. Akibatnya, sejumlah besar pidato diberikan dalam Komisi tentang masalah orientasi seksual dan identitas gender.¹²

ILGA secara resmi diundang oleh GRULAC, kelompok Amerika Latin dan Karibia PBB. Brazil menyatakan komitmennya yang berkelanjutan terhadap resolusi tentang orientasi seksual dan Hak Asasi Manusia. Berterima kasih atas undangan Menteri Sergio Cerda, kepala delegasi Argentina di PBB, sebuah panel aktivis yang dipimpin oleh ILGA memiliki kesempatan untuk mengungkapkan keprihatinan mereka tentang pelanggaran hak asasi manusia atas dasar orientasi seksual dan identitas gender. Rosanna Flamer Caldera, co-Secretary general of ILGA secara resmi meminta anggota GRULAC untuk mempertimbangkan co-sponsor resolusi tahun depan.¹³ Pada tahun 2003, pada sesi ke 59 UNHCR Brazil memperkenalkan resolusi “Hak Asasi Manusia dan Orientasi Seksual”. Akan tetapi resolusi tersebut ditunda pada sesi ke 60 CHR yang diadakan di Jenewa pada tanggal 15 Maret hingga 24 April 2004. Adanya resolusi Brazil menjelaskan bahwa tujuan tersebut bukan untuk menciptakan hak asasi manusia baru akan tetapi untuk membangun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Resolusi ini juga menegaskan bahwa Hak Asasi Manusia dan prinsip dasar lesbian, gay, dan biseksual berhak atas perlindungan dan memperoleh hak asasi manusia yang sama seperti yang lainnya.¹⁴

Munculnya oposisi terhadap resolusi ini cepat dan kuat. Seperti yang dilakukan oleh Duta Besar dari Pakistan yang mengatasnamakan OKI mengirim undangan dan surat kepada seluruh delegasi dan menyerukan kepada mereka bahwa resolusi tersebut sangat menentang dan tidak sesuai secara politis dan kontroversial. Adanya resolusi tersebut juga dianggap menghina 1,2 miliar Muslim di dunia, selain itu juga terdapat laporan bahwa Vatikan melakukan banyak

¹² Queiroz, Jandira. 2010. *5th ILGA-LAC Conference Brings Together more than 400 LGBTI Activies in Curitiba, Brazil*, diambil dari <https://sxpolitics.org/around-the-world-61/3906> diakses pada tanggal 10 Januari 2019.

¹³ *Loc.cit*

¹⁴ Brazilian Resolution diambil dari <https://ilga.org/un-2004-brazilian-resolution> diakses pada tanggal 25 Agustus 2018.

tekanan khususnya di beberapa Negara Amerika Latin. Para penentang resolusi tersebut menyatakan bahwa tidak ada gerakan aksi yang dilakukan sehingga CHR tidak akan mengambil tindakan terkait pengajuan resolusi tersebut. Terdapat 24 suara menentang resolusi tersebut, 22 suara mendukung dan 6 tidak memberikan suara. Terdapat NGO yang berbasis di Mumbai yang bernama Aanchal Trust memberikan dukungan terhadap lesbian, biseksual dan transgender yang memimpin di tahun 2003 hingga 2004 dalam melobi Pemerintah India sepanjang tahun 2013 untuk menyadarkan bahwa resolusi orientasi seksual itu sangat penting untuk diajukan karena kaum lesbian, gay, dan biseksual merupakan manusia yang berasal dari semua ras, agama, kasta, status ekonomi dan juga berhak untuk memperoleh kesetaraan dan hak perlindungan terhadap diskriminasi atas dasar orientasi seksual.¹⁵ Adanya resolusi yang diajukan oleh negara Brazil mengenai orientasi seksual memang memerlukan sebuah perjuangan dan proses yang mana resolusi tersebut tidak langsung memperoleh persetujuan dari PBB.

Negara Brazil berhasil mengejutkan setiap orang dalam mempersentasikan resolusi tersebut pada tahun 2003. Hal tersebut memunculkan banyak negara yang kritis dalam menanggapi kemungkinan resolusi tersebut untuk mendapatkan persetujuan dikarenakan pada saat itu pemerintah negara Brazil tidak mempunyai banyak waktu untuk membangun sebuah konsensus sebelum teks tersebut disuarakan. Adanya resolusi terkait orientasi seksual ini juga merupakan isu yang sensitif karena masalah tersebut masih diambang penentuan hingga bertahun-tahun dalam memperjuangkannya. Pada tahun 2003 pula anggota Organisasi Konferensi Islam meminta Brazil untuk mengoreksi teks yang diajukan tersebut dan Brazil

¹⁵ *Loc.cit.*

sendiri tidak menarik teks tersebut melainkan mengajukan penundaan debat hingga tahun depan.¹⁶

Resolusi Brazil ini menjadikan pro dan kontra seperti halnya resolusi ini tidak boleh hanya menjadi inisiatif barat saja karena hal tersebut dapat menyakiti negara-negara arab yang mana kontra terhadap resolusi yang diajukan tersebut. PBB merupakan forum yang unik dimana di dalamnya negara-negara tidak membela hak asasi manusia untuk negara mereka sendiri melainkan untuk keputusan semua negara. Dan negara-negara cenderung akan membahas dan memperjuangkan isu-isu lain yang tidak berhubungan dengan hak asasi manusia. Resolusi Brazil ini terjadi di masa yang sulit dan dengan mudah dapat dimanfaatkan secara politik untuk melawan negara-negara sekuler bagi negara fundamentalis.

5.2.4 ILGA melakukan kampanye *same sex marriage*

Di Negara Brazil kegiatan homoseksual telah sah sejak tahun 1831 dan berbagai tindakan diskriminasi dan kekerasan terhadap orientasi seksual telah dilarang oleh konstitusi Brazil. Diskriminasi terhadap orientasi seksual juga terjadi di beberapa seperti halnya negara Bahia, Distrik Federal, Minas Gerais, Paraiba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina dan Sao Paulo.¹⁷ Komunitas LGBT di Brazil dan di beberapa negara lain sering kali dianggap sebagai warga negara yang memiliki kelas rendah namun keadaan tersebut mulai membaik dan mengalami perkembangan.

ILGA merupakan salah satu NGO yang memberikan dukungan dan memkampanyekan resolusi yang berkaitan dengan orientasi seksual merupakan hak asasi manusia. Oleh sebab itu negara Brazil menegaskan kembali terkait komitmen terhadap resolusi tersebut yang dimana bertujuan untuk membasmi semua tindakan kekerasan dan diskriminasi terhadap kaum LGBT.

¹⁶ *ILGA World Conference, 2014*, di ambil dari <http://ilga-lac.org/en/ilga-world-conference-2014/> diakses pada tanggal 10 Januari 2019.

¹⁷ Canada, Immigration and Refugee Board of Canada. (2008). Hal 1.

Dalam memenuhi ketentuan dan peraturan konstitusi yang berlaku pemerintah Brazil telah menetapkan kebijakan publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak yang dimiliki kaum LGBT dan menghormati adanya keragaman yang dimiliki setiap individu sehingga dapat mencegah adanya bentuk kekerasan yang dilakukan oleh para homophobia. Adanya kampanye yang dilakukan ILGA terkait isu-isu hak LGBT menjadikan pemerintah menangani isu terkait hak LGBT semakin meningkat disetiap tahunya.¹⁸

Pada tahun 2003 negara Brazil merupakan negara yang memperkenalkan resolusi pertama kali kepada komisi PBB terhadap Hak Asasi Manusia (UNHCR) yang mana mempunyai tujuan untuk adanya perlindungan Hak Asasi Manusia bagi seluruh masyarakat tanpa adanya memandang orientasi seksual. Tidak hanya itu Brazil juga mensponsori resolusi lainnya, diantaranya adalah Resolusi Hak Asasi Manusia, Orientasi Seksual, dan Identitas Gender yang mana resolusi tersebut diadopsi oleh Organisasi yang berasal dari Negara-negara di Amerika.¹⁹

Perlindungan yang diberikan kepada pasangan sesama jenis di Brazil telah mengalami peningkatan selama dua puluh tahun terakhir. Beberapa pengadilan Brazil telah memberikan perlakuan hukum yang setara bagi kelompok pasangan sesama jenis tersebut.²⁰ Adanya keputusan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Brazil mengenai pernikahan sesama jenis menimbulkan berbagai perdebatan di Brazil. Akan tetapi beberapa masyarakat juga memuji kerja para aktivis LGBT dalam mendukung negara dan memperoleh keuntungan hukum.

Pada tahun 2008 Presiden Brazil yaitu Luiz Inacio Lula da Silva telah meresmikan konferensi yang membahas tentang hak para kaum LGBT, yang mana konferensi tersebut membahas tentang dukungannya terhadap kaum LGBT untuk memperjuangkan hak-hak mereka.

¹⁸ Switzerland, 2015. Permanent Mission of Brazil to the United Nations Office in Geneva, No 31, 15, ch.,Louis-Dunant - 1202, Geneva. Hal 1.

¹⁹ *Op.cit*

²⁰ Adilson, Jose Moreira. 2007. *Equality Same-sex Couple*, diambil <https://revista.drclas.harvard.edu/book/equality-same-sex-couples> diakses pada tanggal 25 Agustus 2018.

Konferensi yang diselenggarakan oleh Presiden Lula merupakan konferensi pertama di dunia yang diadakan oleh pemerintah Brazil itu sendiri yang bertujuan untuk mempromosikan hak-hak bagi kaum LGBT. Konferensi tersebut membawa tema “*Brazil Without Homophobia Program*” untuk mempromosikan kewarganegaraan bagi kaum homoseksual dan menghapus semua tindakan diskriminasi terhadap para komunitas LGBT. Presiden Lula juga memerintahkan agar para kaum LGBT memperoleh pelayanan hukum, psikologis dan sosial yang akan tersedia di seluruh negara bagian di Brazil. Hal tersebut juga didukung oleh pemerintah negara bagian Rio de Janeiro yang mana juga memberikan dukungan bagi komunitas LGBT untuk menyediakan layanan konseling, bantuan medis, dan perlindungan terhadap hak asasi.²¹ Oleh sebab itulah Brazil merupakan negara yang dikenal dengan negara promotor bagi hak-hak LGBT di level internasional.

Di tahun 2009 pemerintah federal membangun kantor umum yang mana untuk mempromosikan hak kaum LGBT. Hal tersebut merupakan bentuk sebagai bagian dari sekretariat yang berdiri di bidang hak asasi manusia. Selain itu juga pemerintah federal mempunyai misi yang bertujuan untuk mendorong dan mengkoordinasi untuk mengembangkan kapasitas dalam tingkat nasional dan regional agar memperoleh perhatian pemerintah terhadap isu kekerasan bagi kaum LGBT.²² Sistem nasional untuk melawan dan memerangi kekerasan terhadap kaum LGBT telah berlaku pada tahun 2013. Hal tersebut dikarenakan adanya tanggapan yang diperoleh dari seruan berbagai organisasi masyarakat sipil untuk mendorong peningkatan kapasitas pemerintah terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi yang dilakukan homophobia terhadap kaum LGBT. Untuk dilakukannya pencegahan terhadap kekerasan tersebut dibelakukannya sebuah pengawasan dan melakukan tindak hukum terhadap pelaku kekerasan.²³

²¹Adilson, Jose Moreira, *Loc.cit.*

²² *Permanent Mission of Brazil to the United Nations Office in Geneva, loc. cit.* Hal 3.

²³ Adilson, Jose Moreira, *loc.cit.*

Selain itu juga dalam upaya mendukung untuk melawan kekerasan bagi kaum LGBT pemerintah Brazil juga mendorong kapasitas kelembagaan bagi pemerintah lokal, yaitu pembentukan komite-komite reaksional terhadap homophobia, adanya pemantauan atau pengawasan terhadap kasus kekerasan terhadap kaum LGBT dan yang terakhir adanya dilakukannya kerjasama dengan negara bagian dan kota lainnya untuk memberikan perlindungan terhadap kaum LGBT. Tindakan yang dilakukan pemerintah Brazil ini merupakan upaya penting terhadap kasus yang mendesak ini. Adanya promosi dan perlindungan hak-hak LGBT merupakan kewajiban di level internasional yang mana hal tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia.²⁴

Adanya penyelenggaraan yang dilakukan pemerintah pada tahun 2008 terkait hak asasi LGBT, menciptakan sebuah kesepakatan untuk menetapkan rangkain tujuan dan pedoman bersama untuk mengenai kebijakan nasional terhadap isu-isu LGBT yang menjadi pembahasan hangat. Pada tahun 2011 pula diadakan pertemuan pertama yang diselenggarakan dewan nasional untuk mempromosikan hak kaum LGBT. Dewan Nasional pada saat ini telah menjadi bagian dari struktur sekretariat untuk kantor pejabat presiden mengenai isu-isu kebijakan publik.²⁵ Dewan nasional itu sendiri terdiri dari 9 perwakilan pemerintahan dan 9 anggota lainnya yang dipilih oleh organisasi masyarakat sipil.

Pemerintah Fedral Brazil telah menghasilkan laporan tahunan terkait kekerasan yang terjadi di Brazil sejak tahun 2011, yang mana sebagian data telah dikumpulkan oleh Disque 100 yaitu pusat panggilan gratis yang menerima keluhan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di tingkat nasional. Jika tidak adanya data yang kredibel terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap kaum LGBT menjadikan keefektifan kebijakan publik tersebut

²⁴ *Ibid.* Hal 4

²⁵ Wyls, Jean. *The Struggle for the Rights of LGBT People in Brazil*, diambil dari <https://www.pgaction.org/inclusion/blog/struggle-for-lgbt-rights-brazil.html> diakses pada tanggal 10 Januari 2019/

terhambat. Terdapat laporan yang menyatakan bahwa 82,2% kekerasan yang dilakukan adalah kekerasan secara verbal, 72,01% kekerasan terhadap diskriminasi penolakan penggunaan ruang publik dan segregasi lainnya dan 32,68 lainnya merupakan kekerasan yang dilakukan secara fisik.²⁶ Seringkali adanya pembunuhan terhadap kaum LGBT juga merupakan latar belakang dari adanya kebencian terhadap kaum LGBT atau homophobia.

Dalam pendidikan pemerintah Brazil juga mendukung adanya penelitian ekstensif terkait kekerasan homo, lesbian dan transpobia, bullying dan isu kekerasan yang terjadi di sekolah-sekolah, dengan begitu pemerintah dapat menilai diskriminasi yang seperti apa dan bagaimana yang dapat mempengaruhi kelompok LGBT dapat memperoleh dan menikmati kebebasan hak mereka untuk memperoleh pendidikan. Tidak hanya pendidikan saja pemerintah juga peduli akan kesehatan para orang LGBT dan menyediakan bantuan kesehatan yang telah disediakan oleh sistem kesehatan masyarakat. Adanya homophobia merupakan fenomena struktural budaya yang dianggap tidak manusiawi.²⁷ Kekerasan yang sering terjadi terhadap kaum LGBT sering kali dimaafkan secara sosial oleh sebab itu pemerintah Brazil ingin merubah kebiasaan itu dengan mempromosikan dan mengkampanyekan kesadaran masyarakat dalam bertoleransi dan menghormati keragaman seksual.

Pemerintah Brazil telah memberikan bantuan dana penuh kepada orang-orang transgender yang ingin melakukan pergantian kelamin dan menyediakan semua obat-obatan yang diperlukan hingga bantuan psikologis. Selain itu juga kementerian kesehatan telah mengkampanyekan untuk meningkatkan kesadaran yang bertujuan memberi dukungan dan meningkatkan harga diri dan kepercayaan para transgender. Kampanye yang dilakukan juga memberikan informasi terkait pencegahan penyakit HIV AIDS dan juga mencegah adanya

²⁶ *Ibid.* Hal 5.

²⁷ *Permanent Mission of Brazil to the United Nations Office in Geneva, loc.cit.*

diskriminasi dan kekerasan terhadap lembaga bantuan kesehatan.²⁸ Brazil akan terus berusaha untuk mempromosikan dan mengadvokasi dunia yang bebas dari adanya tindakan kekerasan ataupun diskriminasi terutama terhadap orientasi seksual dan identitas gender.



²⁸ *Ibid.* Hal 7.

BAB VI

PENUTUP

Setelah melakukan penelitian terkait peran ILGA dalam melegalisasi pernikahan sesama jenis di Brazil pada tahun 2013, penulis akan menutup penelitian ini dengan memberikan kesimpulan dan juga saran penelitian untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti terkait dengan isu ini. Kesimpulan yang penulis berikan berdasarkan argumen utama yang ada pada BAB II dan analisa yang ada pada BAB V. Pada sub bab saran, penulis akan memberikan saran bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneruskan penelitian ini.

6.1 Kesimpulan

Isu LGBT merupakan isu yang saat ini menjadi pembahasan yang hangat di level nasional maupun level internasional. LGBT sendiri merupakan kelompok minoritas yang mana menyukai sesama jenis dan sering kali mengalami tindak kekerasan hingga diskriminatif. Banyaknya kelompok minoritas yang berjuang untuk memperoleh hak asasi manusia yang setara dengan hak manusia lainnya. Seperti halnya di negara Brazil yang mana kelompok LGBT tersebut berjuang untuk dapat melakukan pernikahan seperti halnya di negara-negara lain yang lebih dulu telah melegalkan pernikahan sesama jenis.

Tentu saja kelompok minoritas tersebut pun tidak diam dalam memperjuangkan hak-hak kesetaraannya. Kelompok minoritas LGBT tersebut pun membentuk sebuah komunitas yang mana kelompok komunitas LGBT nasional tidak hanya bertindak sendiri dalam memperjuangkan hak-hak mereka dan melawan tindak kekerasan yang dilakukan homopobik akan tetapi adanya dukungan yang diberikan oleh NGO yang mempunyai tujuan dan kepentingan bersama seperti komunitas LGBT yang ada di Brazil. NGO ini juga bertugas memberikan dukungan dan mempengaruhi kebijakan suatu negara.

International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Assosiation merupakan NGO yang berdiri tidak hanya untuk memperjuangkan hak asasi manusia saja akan tetapi hak asasi bagi kaum LGBT, hak kaum perempuan dan lain sebagainya. Maka dari itu ILGA memberi dukungan terhadap organisasi LGBT yang ada di Brazil untuk memperjuangkan hak kesetaraan mereka dan memperoleh persetujuan dalam melakukan pernikahan sesama jenis. Selain organisasi LGBT di Brazil mempunyai tujuan yang sama seperti ILGA, banyaknya tidak kekerasan dan diskriminasi juga menjadi faktor NGO ini memberikan dukungan terhadap organisasi LGBT di Brazil.

Peran ILGA dalam mendorong di sahkannya pernikahan sesama jenis dan memerangi tindak kekerasan terhadap kaum LGBT sebenarnya mempunyai tiga peran yaitu *implementer*, *catalyst*, dan *partner*. Akan tetapi dperan ILGA dalam legalisasi pernikahasn sesama jenis di Brasil, ILGA hanya menggunakan peran catalyst saja. Dalam peran *catalyst* ILGA melakukan konferensi rutin yang diadakan setiap tahun yang mana di bertujuan untuk melobi para anggota ILGA dan juga pengamat LGBT lainnya terkait Brazil tanpa homophobia, yang kedua adanya kampanye atau promosi yang dilakukan untuk memperoleh perhatian dunia bahwa isu LGBT perlu diperhatikan, dan yang ketiga adalah memperoleh sebuah dukungan dari pemerintah untuk membuat atau mengubah kebijakan terkait di legalnya pernikahan sesama jenis di Brazil.

Berdasarkan survey *Equakdex* adanya peningkatan opini publik untuk menerima homoseksual dan dilakukannya pernikahan sesama jenis. Dan sejak disahkannya kebijakan tersebut telah banyak pasangan sesama jenis yang mendaftarkan diri untuk melakukan pernikahan yang sah. Meskipun adanya kebijakan yang mengesahkan pernikahan sesama jenis akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk mengurangi kekerasan yang diperoleh kaum

LGBT dari tindakan homophobia karena masih adanya pro dan kontra dari masyarakat Brazil sendiri terhadap kebijakan tersebut.

6.2 Saran dan Rekomendasi

Adanya penelitian yang ditulis oleh penulis, penulis sadar masih adanya kekurangan diberbagai aspek mengingat penulis memiliki kekurangan baik dalam hal waktu ataupun dalam pengerjaannya. Untuk itu penulis berharap kepada peneliti selanjutnya yang mana nantinya akan mendalami penelitian terkait peran NGO, khususnya dalam isu *human right* atau LGBT. Pada dasarnya isu yang diambil oleh penulis tidak hanya dapat dilihat melalui konsep atau teori peran NGO saja kan tetapi peneliti berharap peneliti selanjutnya dapat menggunakan berbagai konsep atau teori lainnya yang relevan dengan isu tersebut.

Penulis juga menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini lebih dalam lagi. Misalnya melalui berbagai kajian faktor-faktor yang lebih komprehensif maupun melalui penggunaan tahun yang berbeda dan negaraa yang berbeda pula. Dengan begitu penelitian mengenai peran ILGA dalam legalisasi pernikahan sesama jenis di Brazil pada tahun 2013 dapat menjadi penelitian yang lebih lengkap.